



LAPORAN KINERJA Tahun 2021



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948
Email : kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.



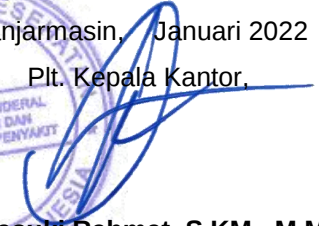
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan laporan tahun kedua untuk periode 2020 - 2024 atas bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada segenap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Laporan kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik untuk penyempurnaan laporan kinerja yang lebih baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif serta berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

Banjarmasin, Januari 2022
Plt. Kepala Kantor,

H. Basuki Rahmat, S.K.M., M.M.
NIP. 197004141991031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. SUSUNAN ORGANISASI	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
F. SUMBER DAYA MANUSIA	5
G. MAKSUD DAN TUJUAN	8
H. SISTEMATIKA PENULISAN	9
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. PERENCANAAN KINERJA	10
B. PERJANJIAN KINERJA	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	76
IV. PENUTUP	84
V. LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	
HASIL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KKP SE-INDONESIA DENGAN SATKER	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum	6
Tabel 2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	7
Tabel 3	Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024	12
Tabel 4	Rencana Kinerja Tahunan 2021	13
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	14
Tabel 6	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 7	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020-2021	79
Tabel 8	Laporan Posisi Barang Milik Negara	80
Tabel 9	Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Jenis Belanja	80
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Klasifikasi Capaian Rincian Output Kegiatan	81
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Distrbusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	6
Grafik 2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	8
Grafik 3	Distibusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Grafik 4	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan	18
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2020-2021	19
Grafik 6	Perbandingan Realisasi Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan dengan Target RAK	21
Grafik 7	Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	32
Grafik 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020-2021	34
Grafik 9	Perbandingan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target RAK	34
Grafik 10	Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu Masuk Negara	44
Grafik 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020-2021	45
Grafik 12	Perbandingan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dengan Target RAK.....	47
Grafik 13	Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran	54
Grafik 14	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2021	54
Grafik 15	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target RAK	55
Grafik 16	Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	61
Grafik 17	Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Target RAK	62

Grafik 18	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker	67
Grafik 19	Perbandingan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker Tahun 2020-2021	68
Grafik 20	Perbandingan Realisasi Kinerja implementasi WBK Satker dengan Target RAK...	68
Grafik 21	Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	74
Grafik 22	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020-2021	74
Grafik 23	Perbandingan Realisasi Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan Target RAK.....	75
Grafik 24	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2021	79
Grafik 25	Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2021	81

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dipimpin oleh Kepala Kantor memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta amanat International Health Regulation (IHR) Tahun 2005 melalui Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024..

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan terutama terkait koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (PHEIC) di pintu masuk negara dengan semua *stake holder* di pelabuhan dan bandara dan instansi terkait lainnya dengan adanya berbagai fenomena di wilayah Kalimantan Selatan antara lain :

1. Kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai kebijakan terkait lalu lintas orang antar wilayah dan Negara yang berpengaruh pada cakupan pelayanan dan pengawasan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan dan bandara.
2. Volume lalu lintas kapal dalam karantina atau dari luar negeri dan dalam negeri yang tidak terpengaruh dengan pandemi covid-19.
3. Adanya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19.
4. Adanya bencana banjir selama 2 tahun terakhir yang berdampak pada fasilitas kesehatan, perkantoran dan sarana prasarana lainnya, berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, persediaan alat dan bahan pendukung penanganan covid-19.

Untuk menghadapi kondisi tersebut di atas, melalui sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, akan dapat dicapai dengan hasil indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan tercapai 2,332,058 dari target 1,808,639 dengan pencapaian kinerja 129%.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai 100% dari target 95% dengan pencapaian kinerja 105%.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara tercapai 108% dari target 90% dengan pencapaian kinerja 120%.

Sedangkan sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, akan dapat dicapai dengan hasil indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja anggaran tercapai 87.86 dari target 83 dengan pencapaian kinerja 106%.
2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tercapai 98.25 dari target 93 dengan pencapaian kinerja 106%.
3. Kinerja implementasi WBK satker tercapai tercapai 81.73 dari target 75 dengan pencapaian kinerja 109%.
4. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL tercapai 74.79% dari target 60% dengan pencapaian kinerja 125%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian ini antara lain adalah program kegiatan telah dilaksanakan hampir di semua wilayah kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilakukan secara lebih terintegrasi dan dapat dioptimalkan serta adanya peningkatan dan perluasan target cakupan kegiatan di wilayah kerja dengan capaian realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 5,51 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 16,562,837,542,- atau 97,64 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 16,963,539,000,-.

Untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja Tahun 2021 yang merupakan tahap kedua dari masa 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Periode 2020 – 2024, maka diperlukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Penguatan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM terutama dalam penguasaan teknologi dan informasi.
3. Peningkatan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan BBTCL PP Banjarbaru dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Penguatan Jejaring Kemitraan dan Koordinasi dengan instansi di wilayah pelabuhan dan bandara untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan kekarantina kesehatan.
5. Peningkatan dan penguatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala secara berjenjang di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin.

Selain itu, diperlukan pengembangan program kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang agar dapat lebih selaras dengan perkembangan penetapan dan upaya pencapaian indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan dan indikator kinerja program Ditjen P2P Kemenkes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang kesehatan yang meliputi perubahan *mind-set* dan *culture-set* aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, dan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta amanat *International Health Regulation* (IHR) Tahun 2005, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Instruksi Presiden terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Kinerja semakin menguatkan bahwa sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur sebagai salah satu persyaratan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berkantor di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan untuk menghadapi berbagai isu strategis yang terjadi baik pada level nasional maupun lokal daerah, antara lain :

1. Pandemi Covid-19 yang merebak di dunia hingga Indonesia sejak bulan Desember 2019 yang mempengaruhi sendi-sendi perekonomian nasional dan pola hidup masyarakat karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
2. Penerapan kebiasaan baru (*New Normal*) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.
3. Perkembangan teknologi dan pasar global mengakibatkan intensitas lalu lintas alat angkut yang semakin tinggi dan cepat, membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.
4. Pelabuhan dan Bandara merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk pesawat, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*).
5. Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negative dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, social budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.
6. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi upaya sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan kontijensi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (PHEIC) di pintu masuk negara dengan semua stake holder dan instansi terkait lainnya dengan adanya berbagai fenomena di wilayah Kalimantan Selatan antara lain : peningkatan lalu lintas orang yang melakukan perjalanan internasional atau ibadah umrah, tingginya volume lalu lintas kapal dalam karantina atau dari luar negeri, dan adanya pertumbuhan industri dan tambang di kawasan Kalimantan Selatan yang mengakibatkan lalu lintas para ekspatriat dan para pekerja asing melalui bandara.
7. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan BBTKL PP Banjarbaru dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pelayanan kesehatan dan kekarantinaan kesehatan di wilayah pelabuhan dan bandara di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, dalam penyusunan Perencanaan Kinerja harus menggambarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan yaitu cegah tangkal penyakit menular dan potensial wabah yang merupakan bagian integral dari Program Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI yang memiliki visi dan misi mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dengan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung terwujudnya misi pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, memerlukan berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan sebagaimana tertera dalam Perjanjian kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2021.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkantor di daerah atau Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan dan Klasifikasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. KKP secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin termasuk klasifikasi KKP Kelas II.

2. Tugas

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas KKP Kelas II Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

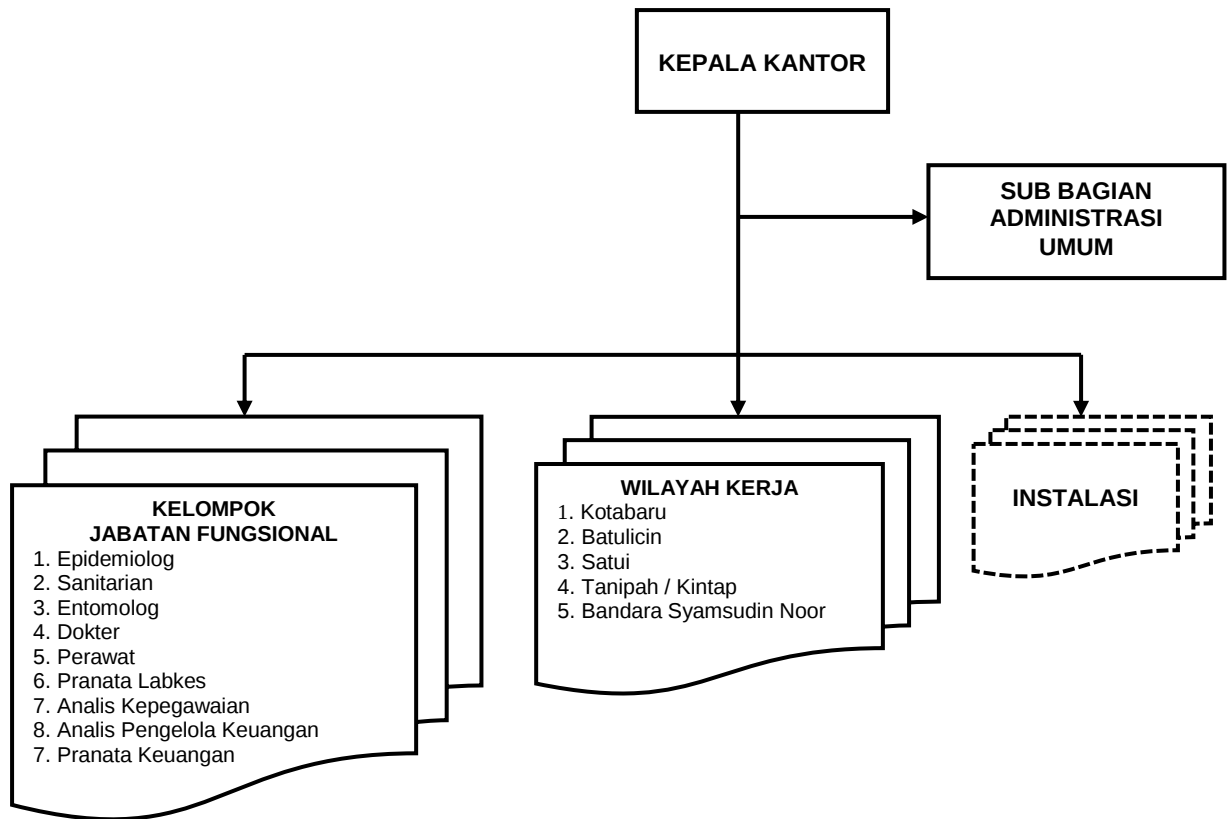
- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Sehubungan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka Menteri Kesehatan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang baru, sehingga struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum
2. Instalasi
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANJARMASIN



D. SUMBER DAYA MANUSIA

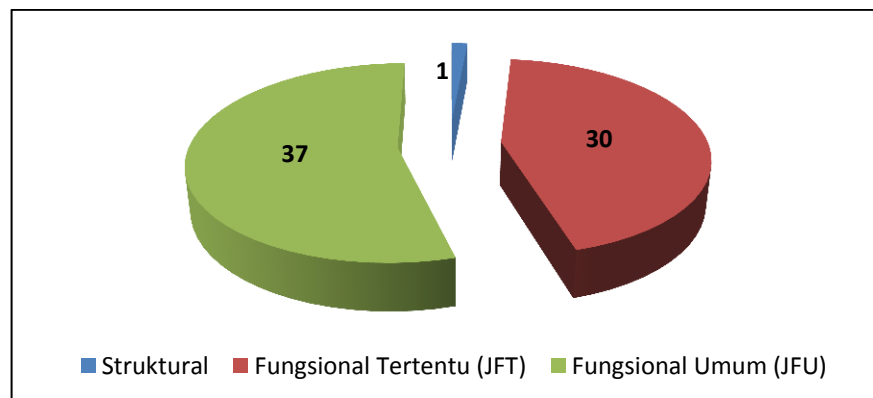
Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan Bulan Desember 2021 di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 68 orang dan Tenaga Honorer berjumlah 36 orang.

Keadaan ini apabila dibandingkan dengan volume kegiatan dan beban kerja KKP Kelas II Banjarmasin masih sangat kurang. Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang kekuatan personil KKP Kelas II Banjarmasin sebagai berikut :

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Berdasarkan kelompok jabatan, dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Jabatan Struktural
- 2) Jabatan Fungsional Umum (JFU)
- 3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)



Grafik 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pegawai KKP Kelas II Banjarmasin terbesar masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 30 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 37 orang dan Jabatan Struktural sebanyak 1 orang.

1) Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang hingga saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor dan hanya 1 orang Pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

2) Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 38 orang dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) terdiri atas :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Dokter	3
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli	6
3	Epidemiolog Kesehatan	0
4	Perawat	6
5	Sanitarian Ahli	3
6	Sanitarian	3
7	Asisten Apoteker	1
8	Perencana	3
9	Analisis Keuangan	1
10	Analisis Kebijakan BMN	0

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
11	Pengadministrasi Keuangan	0
12	Pengelola BMN	1
13	Arsiparis	1
14	Pengemudi	1
	Total	29

3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

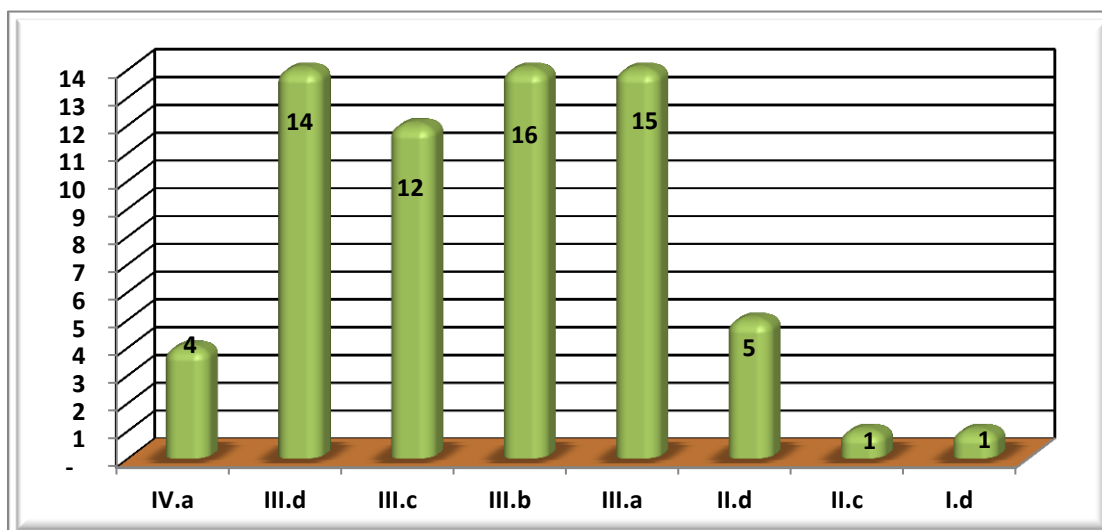
Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari 37 orang dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terdiri atas :

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	Dokter Muda	1
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	5
3	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	4
4	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	3
5	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2
6	Epidemiolog Kesehatan Terampil	1
7	Sanitarian Ahli Muda	3
8	Sanitarian Ahli Pertama	3
9	Sanitarian Mahir	2
10	Sanitarian Penyelia	2
11	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
12	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1
13	Entomolog Kesehatan Mahir	1
14	Perawat Mahir	3
15	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1
16	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2
17	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1
18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
19	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
20	Analisis Keuangan APBN Terampil	1
	Total	38

b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

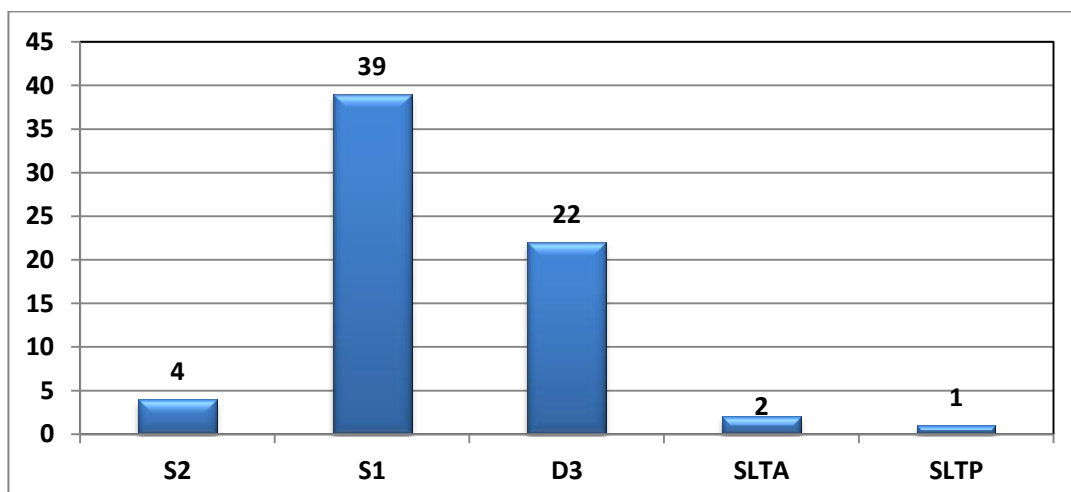
Golongan Ruang Pegawai yang terdapat pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin yang tertinggi Golongan IV.a dan terendah I.d. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

c. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pegawai KKP Kelas II Banjarmasin memiliki jenjang pendidikan tertinggi Pasca Sarjana (S2) dan terendah SMP. Untuk lebih jelasnya, data pegawai tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Garfik 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah yang memuat pencapaian program kegiatan dalam pencapaian tujuan kegiatan dengan segala faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menyelaraskan maksud dan tujuan penyusunan laporan ini, maka diperlukan Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang disusun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2461 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan yang terdiri dari :

1. Bab I (Pendahuluan)
Menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, SDM, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)
Menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2021.
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)
Menjelaskan pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2021, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja
4. Bab IV (Kesimpulan)
Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam penyusunan perencanaan kinerja terdiri atas tiga instrumen yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Kinerja terdapat perjanjian kinerja yang merupakan tekad dan janji; rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran berbagai upaya untuk mencapai Visi, Misi, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi agar mencapai target kinerja pada tahun terakhir masa pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 – 2024 di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2021.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 - 2024

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis dengan didukung terlaksananya Rencana Strategis, Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana / prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin mengacu pada Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020 - 2024 dan untuk menyatukan

persepsi dan fokus arah tindakan yang diambil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yaitu sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 -2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan dengan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui upaya Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan melalui program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Dalam upaya mencapai misi tersebut perlu ditetapkan Sasaran Strategis agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat jelas dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis Tahun 2020-2024 yaitu :

1. **Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah** dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebanyak 2,189,216.
 - b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 97 %
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara sebesar 95 %

2. **Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- Nilai Kinerja Anggaran sebesar 85..
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93.
 - Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75.
 - Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80 %.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai hingga Tahun 2024 tersebut di atas, telah ditetapkan target kinerja setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 3. Target Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 -2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,001,644	1,808,639	1,998,906	2,074,135	2,189,216
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	97%	97%
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	80%	90%	95%	95%	95%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85
		Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	93	93	93	93
		Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	60%	80%	80%	80%

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil pencapaian kegiatan Tahun 2020 yang relevan dengan indikator kinerja kegiatan Tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2020 - 2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja 2021
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639
		a. Pemeriksaan/ Penapisan orang	1,713,716
		b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	93,447
		c. Pemeriksaan Barang	165
		d. Pemeriksaan Lingkungan	1,311
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		a. Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang	1,500
		b. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang	157
		c. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut	20
		d. Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan	460
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%
		a. Kelengkapan Data Surveilans	1
		b. Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	12
		c. Penyusunan rencana kontigensi	0
		d. Indeks pinjal ≤ 1	65
		e. HI perimeter = 0	90
		f. Tidak ditemukan larva anopheles	12
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93
		Kinerja implementasi WBK satker	75
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	60%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja KKP Kelas II Banjarmasin merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja KKP Kelas II Banjarmasin kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran KKP Kelas II Banjarmasin sampai akhir Tahun 2021. Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Banjarmasin merupakan penetapan atas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2024 yang setiap tahunnya dan telah mendapat persetujuan anggaran. Adapun target kinerja dan sasaran strategis yang ingin dicapai KKP Kelas II Banjarmasin dalam dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2021
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93
		Kinerja implementasi WBK satker	75
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	60%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja organisasi adalah melalui mekanisme Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang tingkat capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639	2,332,058	129
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100%	105
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%	102%	112
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	83	87.86	106
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	93	98.25	106
		Kinerja implementasi WBK satker	75	81.73	109
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	60%	75%	125

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2021 terlihat dari hasil pencapaian masing-masing indikator dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan total capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebesar : $803 \% \text{ total capaian} / 7 \text{ IKK} = 115 \%$, dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 tercapai sebesar 115 % atau $> 110 \%$ dari target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena penetapan target telah ditentukan secara cermat sesuai perkembangan cakupan dan kebutuhan sasaran setiap tahunnya serta kondisi sumber daya yang ada saat ini.

Untuk lebih jelasnya terkait hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan per sasaran strategis kegiatan mulai dari pengertian, definisi operasional, rumus / cara perhitungan, capaian indikator, Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RAK sampai dengan Tahun 2021, Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja Lain, Perbandingan Capaian Kinerja Secara Nasional, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Indikator Pertama :

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

a. Pengertian

Adalah jumlah pemeriksaan yang dilakukan pada orang baik pelaku perjalanan, ABK, pekerja dan masyarakat tertentu, kapal atau pesawat, obat-obatan, kosmetika, makanan, dan jenazah, serta pemeriksaan sanitasi lingkungan dan survey pengamatan vektor dan binatang penular penyakit di area pelabuhan dan bandara.

b. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu Tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah hasil pemeriksaan :

- 1) Pemeriksaan Penafisan Orang yang terdiri dari : jumlah ABK Kapal Luar dan Dalam Negeri, Penumpang Kapal Dalam Negeri, Jamaah Umrah, jamaah Haji, Penumpang Pesawat Domestik dan Luar Negeri, Screnning HIV AIDS dan TB.
- 2) Pemeriksaan Alat Angkut sesuai Standar Karantina yang terdiri dari : Kedatangan Kapal Luar Negeri, Keberangkatan Kapal Luar dan Dalam Negeri, Kedatangan Pesawat Domestik dan International.
- 3) Pemeriksaan Barang yaitu jenazah
- 4) Pemeriksaan Lingkungan yang terdiri dari pemeriksaan sampel air bersih / minum dan inspeksi sanitasi sarana pengolahannya, pemeriksaan sampel makanan dan usap alat serta inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pangannya (TPP) , inspeksi sanitasi tempat-tempat umum (TTU) , pengawasan kualitas kebisingan , survei /pengamatan vektor Diare, survei /pengamatan vektor DBD, survei /pengamatan vektor Pes, dan survei / pengamatan vektor Malaria.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Jumlah pemeriksaan yang dilakukan

B = Jumlah pemeriksaan yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian pemeriksaan yang dilaksanakan

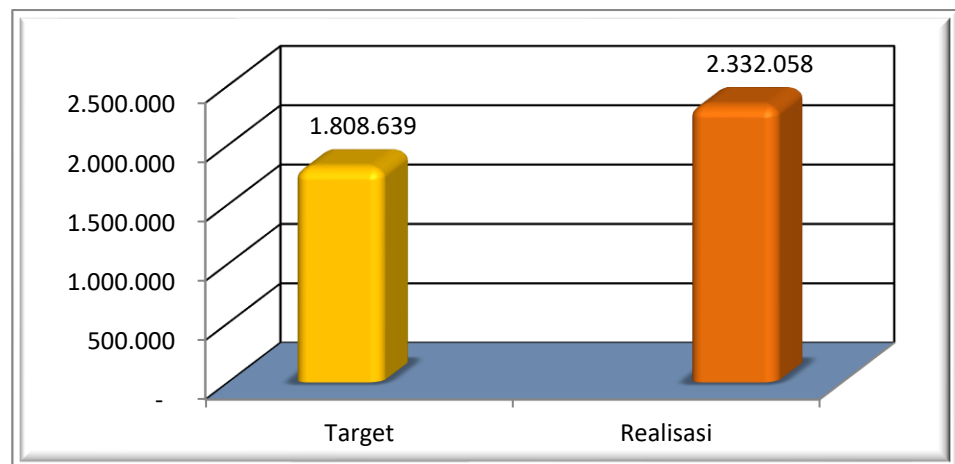
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan selama Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{2,332,058}{1,808,639} \times 100\% = 129\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 4. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 129 %, dimana pemeriksaan orang sebanyak 2,215,359 atau 129,27 %, pemeriksaan alat angkut sebanyak 115,124 atau 123,20 %, pemeriksaan barang yang hanya

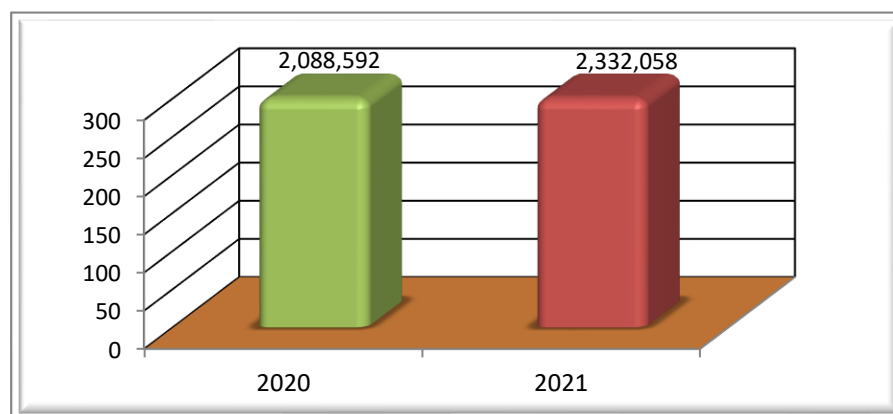
pada pengawasan jenazah sebanyak 264 atau 160 % dan pemeriksaan lingkungan sebanyak 1,311 titik pengawasan atau 100 %.

Adapun data rincian hasil pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang sesuai standar kekarantinaan kesehatan selama Tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan	Target Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	% Capaian
Pemeriksaan Orang	1,713,716	2,215,359	129,27
Pemeriksaan Alat Angkut	93,447	115,124	123,20
Pemeriksaan Barang	165	264	160,00
Pemeriksaan Lingkungan	1,311	1,311	100,00

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 masih sama dengan 2020 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2020 tercapai 2,088,592 dan Tahun 2021 tercapai 2,332,058 dari target yang ditetapkan. Adapun realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2020 dan 2021

Adanya perbedaan lingkup indikator kinerja kegiatan ini dengan tahun sebelum 2020, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja kegiatan. Namun, apabila dilihat dari perbandingan 2020 dan 2021, dari grafik 5 menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi covid-19 Tahun 2020, untuk mengantisipasi capaian kinerja, maka dilakukan revisi / perubahan target kinerja dari 1,998,906 menjadi 1,001,644,

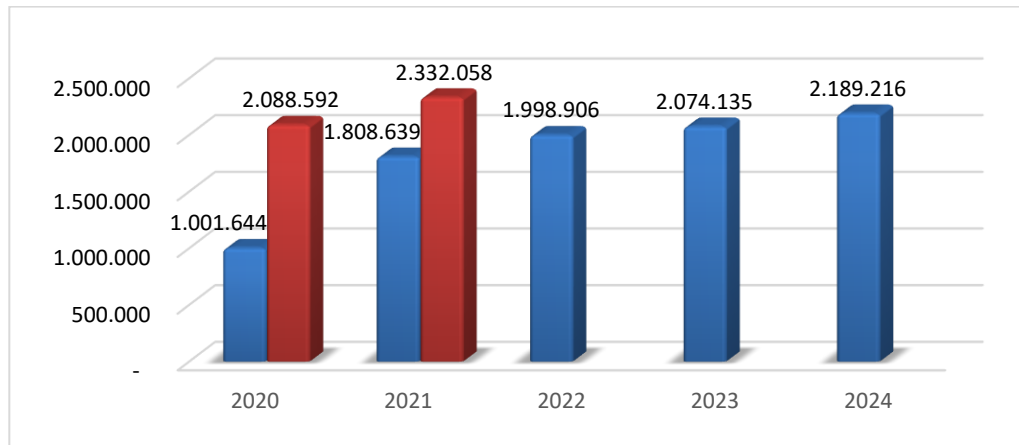
dimana pada awal Tahun cakupan kinerja mengalami penurunan, dimana lalu lintas alat angkut, barang dan lingkungan tidak mengalami perubahan, sedangkan yang terpengaruh hanya lalu lintas orang, namun setelah kebijakan PSBB mengalami pelonggaran lalu lintas orang terjadi peningkatan, sehingga capaian kinerja dapat tercapai sebesar 2,088,592 (209%) dari target 1,001,644. Berbeda dengan Tahun 2021, tidak terdapat perubahan target kinerja mengingat kondisi pandemi covid-19 mulai terkendali, tetapi capaian kinerja dapat tercapai sebesar 2,332,058 (129%) dari target 1,808,639.

Namun apabila dilihat dari data rincian hasil pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang sesuai standar kekarantinaan kesehatan, capaian masing-masing kegiatan selama Tahun 2019 – 2021, menunjukan bahwa pemeriksaan sesuai standar kekarantinaan pada Tahun 2021 untuk pemeriksaan / penafisan orang, alat angkut dan barang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019-2020 dikarenakan lalu lintas orang dan barang ditentukan oleh kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan atau transaksi antar daerah atau antara Negara, kondisi pandemi yang mulai teratasi dan kepatuhan masyarakat atas protokol kesehatan yang ketat terlaksana dengan baik, sehingga pengurangan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan aktifitas ekonomi mulai pulih kembali dan aktifitas masyarakat antar daerah seiring keberhasilan penanganan dan pengendalian covid-19 melalui program 3M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi), 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*), dan vaksinasi covid-19 secara massal. Sedangkan, lalu lintas alat angkut yang mengalami peningkatan dikarenakan pemenuhan kebutuhan ekspor batu-bara dan *plywood* yang meningkat untuk beberapa Negara di Asia terutama China dan Malaysia. Sedangkan, Pemeriksaan lingkungan dibandingkan Tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan, disebabkan berkurangnya jumlah target pemeriksaan sampel air dan sampel makanan karena keterbatasan anggaran jasa layanan laboratorium, serta adanya perubahan volume cakupan layanan pada pengawasan vektor. Sedangkan cakupan sasaran pengawasan lingkungan mengalami peningkatan yang berarti ada upaya untuk semakin memperluas titik pengawasan lingkungan hingga wilayah kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini data perbandingan hasil pemeriksaan :

Kegiatan	Hasil Pemeriksaan		
	2019	2020	2021
Pemeriksaan Orang	3,107,407	1,987,384	2,215,359
Pemeriksaan Alat Angkut	88,055	99,424	115,124
Pemeriksaan Barang	260	165	264
Pemeriksaan Lingkungan	1,731	1,619	1,311

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang sesuai standar kekarantinaan kesehatan apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan Tahun pertama dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebanyak 2,332,058 atau 129 % dari target sebanyak 1,808,639.



Grafik 6. Perbandingan Realisasi Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 dan 2021 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 2,189,216 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, kondisi tersebut seiring dengan peningkatan pengawasan di pintu masuk yang lebih intensif serta didukung dengan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor yang lebih baik.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon 1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2021. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana eselon 1 mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2021 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	89 %	Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan	129%

Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil rekapitulasi data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Rata-rata Target KKP Se-Indonesia	Target Satker	Rata-rata Capaian KKP Se-Indonesia	Capaian Satker
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan	2.353.406	1.808.639	2.472.280	2.332.058

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 1 tercapai melebihi target satker tetapi kurang dari rata-rata nasional, hal ini sesuai kondisi volume kegiatan dan besarnya cakupan wilayah yang dilayani di pintu masuk negara pada satker masing-masing.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan dapat tercapai 129 % atau > 100%. Hal ini dipengaruhi oleh :

- Adanya Kebijakan vaksinasi Covid-19;
- Peningkatan jumlah kouta ekspor sumber daya alam (batu bara) dan Plywood daerah Kalimantan Selatan;
- Peningkatan pengawasan lalu lintas orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebagai upaya pengendalian pandemic covid-19;
- Kondisi pandemic covid-19 setelah meningkatnya varian Delta yang mulai terkendali sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi tidak terlalu ketat mengakibatkan peningkatan jumlah lalu lintas orang dan alat angkut;
- Adanya kebijakan terkait syarat penerbangan bagi pelaku perjalanan sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19;
- Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu sesuai Instruksi Dirjen P2P;
- Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian risiko lingkungan hingga wilayah kerja;

- h) Penetapan target volume output kegiatan telah mengikuti kebijakan perencanaan kegiatan, namun perkembangan pasar penjualan batu bara mempengaruhi lalu lintas alat angkut;
- i) Peningkatan kerjasama perdagangan antara Indonesia khususnya propinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa Negara tetangga khususnya China dan Malaysia;
- j) Pembangunan infrastruktur di dalam Negeri yang terus dipacu dalam pemerintahan sekarang;
- k) Pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah Kalimantan Selatan;
- l) Adanya dukungan peraturan perundangan-undangan untuk pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara.
- m) Komitmen bersama SDM pelaksana program di induk dan seluruh wilayah kerja dalam kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

Namun apabila dibandingkan Tahun 2020 yang tercapai 209 %, maka Tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya revisi target Tahun 2020 akibat pandemic Covid-19, meskipun intensitas pengawasan di pintu masuk lebih tinggi Tahun 2021.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- a) Walaupun telah mencapai 129 %, namun masih terdapat permasalahan terkait keterbatasan SDM kekarantinaan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan terutama untuk pengawasan pada wilayah Bandara Syamsudin Noor yang saat ini telah menjadi Bandara International dan saat ini belum sesuai dengan analisis beban kerja.
- b) Kurangnya respon dari pihak otoritas pelabuhan dan atau bandara (LPLS) dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan pelaku perjalanan di pelabuhan dan bandara yang masih ditemukan belum sesuai ketentuan.
- d) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan bagi pelaku perjalanan baik melalui udara ataupun laut mengenai vaksinasi dan pemeriksaan covid-19 sehingga kadang masih terjadi keributan antara pelaku perjalanan dan petugas.

Pemecahan Masalah :

- a) Saat ini upaya yang sudah dilakukan untuk pemenuhan SDM kekarantinaan yaitu melalui pengangkatan CPNS maupun mutasi pegawai

dari instansi lain, dan pengangkatan tenaga relawan untuk melaksanakan pengawasan selama masa pandemic covid-19 di wilayah Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.

- b) Melaksanakan sosialisasi melalui media cetak berupa banner, leaflet, penyuluhan secara langsung pada saat proses validasi dan media online satker.
- c) Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial instagram tentang peraturan bagi pelaku perjalanan udara dan laut.
- d) Melakukan pendekatan lebih intensif berupa komunikasi cepat /langsung terhadap jejaring kerja (LPLS) di pelabuhan dan bandara.

6) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

AA : Alokasi Anggaran Per Indikator

Ci : % Capaian Indikator

RA : Realisasi Anggaran Per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$30.16 \% = \frac{((Rp. 3,005,821,000 \times 1.29) - Rp. 2,971,041,949)}{Rp. 3,005,821,000} \times 100\%$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dapat tercapai sebesar 2,332,058 atau 129% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.2,971,041,949,-atau 98,84 % dari pagu anggaran

sebesar Rp. 3,005,821,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 30,16 % untuk capaian kinerja sebesar 129 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pertimbangan sasaran yang sama dan keterbatasan tenaga pelaksana, pelayanan *mobile* untuk meningkatkan sasaran layanan dapat tercapai hanya dengan pelayanan dalam kantor. Selama masa pandemik covid-19, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara *virtual meeting* melalui aplikasi zoom atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

7) Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan kesehatan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pelayanan Kesehatan Haji di Bandara

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M dimana kebijakan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan dan keamanan para calon jamaah haji karena pandemi Covid-19, sehingga kegiatan yang dilaksanakan terbatas pada koordinasi untuk persiapan penyelenggaraan embarkasi haji dengan UPT Asrama Haji sebelum adanya kebijakan pembatalan keberangkatan haji dan pelayanan kesehatan pada calon jamaah umrah sebanyak 40 orang atau 133,3% dari target 30 orang.

b) Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang akan melintasi pelabuhan dan bandara dapat terlayani dengan baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi

pelayanan kesehatan situasi khusus, pelayanan vaksinasi, verifikasi terhadap rumah sakit dan klinik yang mengajukan persetujuan pelayanan vaksinasi internasional, pengawasan terhadap rumah sakit dan klinik yang melaksanakan penerbitan dokumen ICV, melakukan pertemuan evaluasi LP/LS dan Klinik/RS penerbitan dokumen ICV di wilayah kerja dan pemeriksaan / pengawasan covid-19 di pintu masuk dengan sasaran sebanyak 13,481 orang (100 %).

c) Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat (PEN)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan penanganan covid-19 di pintu masuk dengan penambahan tenaga perbantuan teknis untuk mengatasi keterbatasan tenaga pelaksana yang bertugas di pelabuhan dan bandara dengan sasaran sebanyak 865,000 orang (100 %).

d) Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara

Kegiatan Layanan faktor risiko di Bandara adalah kegiatan pengawasan dan layanan kekarantinaan di Bandar Udara yaitu Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru, Bandara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dan Bandara Bersujud Batulicin sebanyak 200 layanan (100 %).

e) Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus

Kegiatan layanan kesehatan pada situasi khusus merupakan pelayanan yang dilakukan pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan peningkatan jumlah lalu lintas orang pada tempat dan waktu yang bersamaan pada situasi libur Hari Raya, Natal dan Tahun baru yang dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi di Pelabuhan laut penumpang yaitu Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Batulicin dan 3 (tiga) lokasi di Bandar udara yaitu Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, Bandara Bersujud Batulicin, dan Bandara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru. Pelayanan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan validasi surat hasil pemeriksaan Covid-19 dan vaksinasi covid-19, pelayanan kesehatan poliklinik terbatas, pengendalian risiko lingkungan, surveilans faktor risiko kesehatan dalam kondisi matra sebanyak 90 layanan (100 %).

f) Layanan Survey Vektor Pes

Kegiatan yang dilakukan yaitu :

(1) Pemetaan

Pemetaan daerah Perimeter yang menjadi tempat potensial perkembangbiakan tikus di pelabuhan/bandara. Membagi titik lokasi untuk memudahkan pengawasan / pengendalian.

(2) Persiapan Bahan dan Alat

Melakukan pengadaan bahan operasional kegiatan untuk pelabuhan induk dan semua wilayah kerja berupa alcohol dan alat tulis kantor untuk pelaksanaan administrasi kegiatan.

(3) Pemasangan Perangkap Tikus

Dilaksanakan dengan memasang perangkap tikus pada bangunan-bangunan di area pelabuhan induk dan semua wilayah kerja dengan target seluas 65 hektar. Jumlah perangkap tikus disesuaikan dengan luas dan kondisi setiap pelabuhan dan bandara.

(4) Identifikasi Tikus dan Pinjal

Tikus yang tertangkap akan disisir untuk mendapatkan pinjalnya, selanjutnya dilakukan identifikasi jenis /spesiesnya untuk mendapatkan angka Index Pinjal yang merupakan indikator tingkat kepadatan vektor pembawa penyakit Pes di pelabuhan. Pengendalian dilakukan pada saat ditemukan hasil indeks pinjal > 1 dengan capaian kegiatan dalam setahun sebesar 100%.

g) Pelaksanaan Survey Vektor DBD

Kegiatan yang dilakukan berupa Survei larva *Aedes aegypti* yang dilakukan dengan sistem Random Sampling pada bangunan /rumah yang menjadi sampel pengamatan dengan metode inspeksi (visual) di daerah Buffer , dan pada semua bangunan di area perimeter pelabuhan induk dan wilayah kerja seluas 90 hektar (100%). Survei ini dilakukan oleh kader dari warga masyarakat. Hasil survey yang ditemukan/ positif jentik akan langsung diberi larvasida pembunuh jentik.

h) Survey Vektor Malaria

Kegiatan yang dilakukan berupa :

(1) Survei Jentik Anopheles

Survey jentik Anopheles dilaksanakan di wilayah kerja endemis dengan kondisi geografis banyak terdapat danau / laguna yang berpotensi menjadi tempat perindukan vektor malaria (*Anopheles sp.*).

(2) Survey Nyamuk Anopheles

Survey Nyamuk Anopheles dilaksanakan di wilayah kerja endemis yaitu di pelabuhan wilayah kerja Kotabaru, Batulicin, Satui, Tanipah, dan Pos Sungai Puting , secara rutin 2 kali setahun atau 6 bulan sekali dengan target tercapai seluas 12 Hektar (100%).

i) Survey Vektor Diare

Survey vektor penyakit Diare atau Survey Lalat dilakukan dengan mengukur kepadatan populasi lalat dengan alat fly grill pada tempat –

tempat yang berpotensi mengundang lalat di area perimeter pelabuhan dan bandara. Target luar area yang dilakukan survey Tahun ini seluas 28 Hektar untuk pelabuhan induk dan wilayah kerja dan tercapai 100%.

j) Pengawasan / Pemeriksaan Kualitas Air di Pelabuhan dan Bandara

Pemeriksaan Kualitas Air dilakukan dengan cara pengambilan sampel air bersih / air minum di pelabuhan dan bandara di pelabuhan induk dan wilayah kerja. Selanjutnya sampel air akan dikirim ke laboratorium kesehatan daerah setempat yang terakreditasi KAN (Labkesda Banjarmasin , BBTCLPP Kelas I Banjarbaru) untuk dilakukan pemeriksaan bakteriologis. Kegiatan pengawasan kualitas air ini termasuk juga inspeksi sanitasi terhadap sarana pengolahan air yang ada. Target sampel air yang diperiksa Tahun ini sebanyak 192 sampel dan tercapai 100%.

k) Pengawasan / Pemeriksaan Kualitas Makanan di Pelabuhan dan Bandara

Pemeriksaan Kualitas Makanan dilakukan dengan cara pengambilan sampel air makanan dan usap alat makan / masak di pelabuhan dan bandara di pelabuhan induk dan wilayah kerja. Selanjutnya sampel makanan dan usap alat akan dikirim ke laboratorium kesehatan daerah setempat yang terakreditasi KAN (Labkesda Banjarmasin , BBTCLPP Kelas I Banjarbaru) untuk dilakukan pemeriksaan bakteriologis. Kegiatan pengawasan kualitas makanan ini termasuk juga inspeksi sanitasi terhadap tempat pengelolaan makanan (TPM) yang menyajikannya serta para penjamah makanannya. Target sampel makanan yang diperiksa Tahun ini tercapai sebesar 100% yaitu sebanyak 106 sampel , sampel usap alat sebanyak 38 sampel, serta penjamah makanan sebanyak 35 sampel.

l) Pemeriksaan Kualitas Tempat-tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara

Pemeriksaan Kualitas Tempat-tempat Umum dilaksanakan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan melakukan inspeksi sanitasi lingkungan dan bangunan gedung fasilitas pelayanan umum (terminal penumpang pelabuhan) pada semua pelabuhan laut dan bandara pada seluruh pos dan wilayah kerja.

m) Pemeriksaan Kualitas Udara dan Kebisingan di Pelabuhan dan Bandara

Pemeriksaan Kualitas Kebisingan dilakukan dengan mengukur intensitas kebisingan sesaat dengan menggunakan alat Sound Level Meter di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan gangguan suara bising di

area pelabuhan laut dan bandara. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan atau 12 kali setahun pada Pos Pelabuhan Trisakti pada Kantor Induk Banjarmasin, wilayah kerja Bandara Syamsuddin Noor, dan Pelabuhan di wilayah kerja Kotabaru dengan capaian kegiatan sebesar 100%.

n) Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian HIV AIDS

Kegiatan yang dilaksanakan adalah VCT Mobile dalam rangka deteksi dini penyakit HIV AIDS yang berkoordinasi dengan petugas dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Adapun sasaran layanan ini adalah yang memiliki potensi berisiko terkena HIV AIDS di pelabuhan/ bandara seperti perusahaan pelayaran, masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara, instansi pemerintah disekitar pelabuhan dan bandara sebanyak 9 layanan atau 958 orang yang diperiksa atau 191,6 % dari target 5 layanan (500 orang).

o) Deteksi Dini Terduga TB

Kegiatan yang dilaksanakan adalah deteksi dini terduga TB di seluruh wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dengan melakukan koordinasi dengan petugas dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. Adapun sasaran layanan ini adalah yang memiliki potensi berisiko terkena TB Paru di pelabuhan/ bandara seperti perusahaan pelayaran, masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara, instansi pemerintah disekitar pelabuhan dan bandara sebanyak 19 layanan atau 987 orang yang diperiksa atau 197,4 % dari target 10 layanan (500 orang).

p) Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan layanan pemeriksaan orang, barang dan alat angkut melalui pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan dan bandara dan pemeriksaan alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/Wabah/KKM sebanyak 2 layanan (100 %).

q) Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung program percepatan vaksinasi covid-19 sebagai upaya lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan mobile vaksinasi covid-19 sebanyak 1 layanan (100 %).

r) Pengadaan Alat / Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor dan BPP, sanitasi lingkungan dan bahan/alat medis dan non medis untuk pelayanan di pintu masuk sebanyak 3 paket (100 %).

s) Pengadaan Alat / Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (PEN)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pengadaan penguatan peralatan *health security* berupa *boarding kit*, *thermal scanner*, *air purifier*, dan perangkat pengolah data sebanyak 1 paket (100%).

Indikator Kedua :

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

a. Pengertian

Adalah pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang telah dilakukan pemeriksaan di pintu masuk. Angka ini menggambarkan besaran faktor risiko yang telah ditemukan dari hasil pemeriksaan dan telah dilakukan tindakan pengendalian.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan di pintu masuk pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan berdasarkan temuan pada indikator no.1

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Jumlah faktor risiko yang dikendalikan

B = Jumlah faktor risiko yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian faktor risiko yang dikendalikan

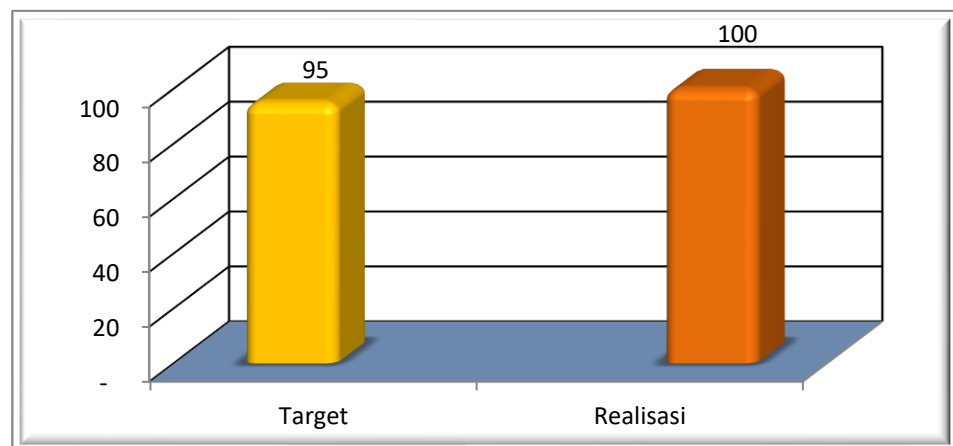
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan selama Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 7. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dapat tercapai > 95 % yaitu sebesar 100 % dari faktor risiko yang ditemukan dan telah dikendalikan atau 105 % dari target yang ditetapkan atau dengan kata lain semua faktor risiko dapat dikendalikan yaitu pemeriksaan orang sebanyak 1,552 orang, pemeriksaan alat angkut sebanyak 264 kapal, pemeriksaan barang sebanyak 41 jenazah, dan pemeriksaan lingkungan sebanyak 460 titik/lokasi.

Adapun data rincian hasil pengawasan faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan selama Tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan	Jumlah diperiksa	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR yang dikendalikan	% Capaian
Pemeriksaan Orang	2,215,359	1,552	1,552	100
Pemeriksaan Alat Angkut	115,124	41	41	100
Pemeriksaan Barang	264	264	264	100
Pemeriksaan Lingkungan	1,311	460	460	100

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

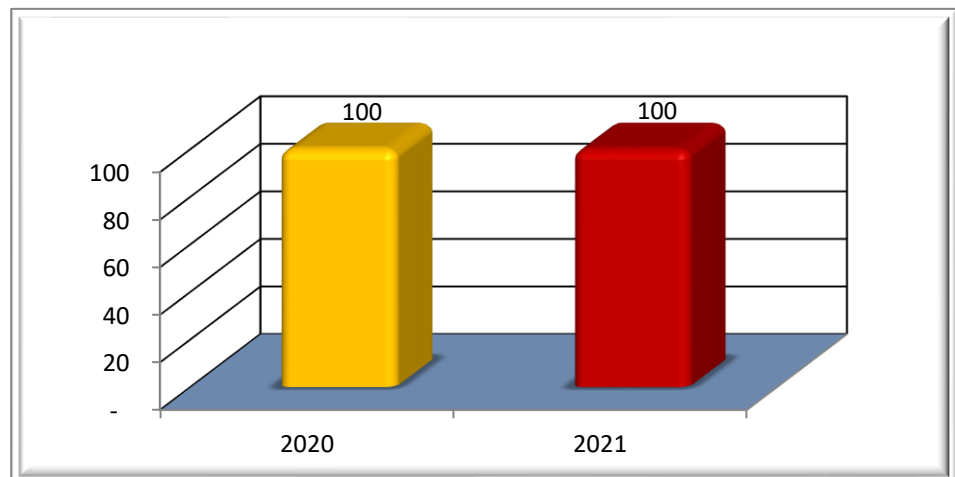
Indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 masih sama dengan 2020 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun

berikutnya. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2020 dan 2021 tercapai 100 % dari target yang ditetapkan.

Namun apabila dilihat dari data rincian hasil pengawasan faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, capaian masing-masing kegiatan selama Tahun 2019– 2021, menunjukkan bahwa capaian faktor risiko yang dikendalikan pada Tahun 2021 untuk pemeriksaan orang mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019-2020 dikarenakan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), adanya syarat pelaku perjalanan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan bebas covid-19 dan wajib menunjukkan kartu vaksinasi covid-19. pemeriksaan alat angkut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019-2020, karena meningkatnya permohonan dari pihak pemilik atau keagenan kapal untuk melakukan tindakan penyehatan kapalnya baik berupa fumigasi maupun desinseksi, selain itu juga adanya beberapa kapal yang ditemukan kasus penyakit PHEIC (kru kapal terkonfirmasi Covid19) yang wajib dilakukan tindakan desinfeksi. Pemeriksaan barang mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019-2020, hal itu disebabkan karena bandara-bandara perintis di wilayah Kalimantan banyak yang tutup dikarenakan regulasi dan persyaratan administratif penerbangan dimasa pandemic yang memberatkan bagi maskapai di bandara perintis tersebut sehingga semua pengangkutan barang/jenazah dialihkan ke Bandara Internasional Syamsuddin Noor. sedangkan pemeriksaan lingkungan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020, akan tetapi apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perubahan jumlah sampel dan titik pengawasan kualitas air bersih dan sampel makanan yang dilakukan pengawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini data perbandingan hasil pengawasan faktor risiko yang dikendalikan :

Kegiatan	Faktor Risiko yang Dikendalikan		
	2019	2020	2021
Pemeriksaan Orang	2,187	1,817	1,552
Pemeriksaan Alat Angkut	34	31	41
Pemeriksaan Barang	260	165	264
Pemeriksaan Lingkungan	573	454	460

Sedangkan apabila dilihat dari persentase capaian bahwa semua faktor risiko yang ditemukan pasti akan dikendalikan dari target yang ditetapkan, maka hasil perbandingan realisasi Tahun 2020 hingga 2021 sebagai berikut :

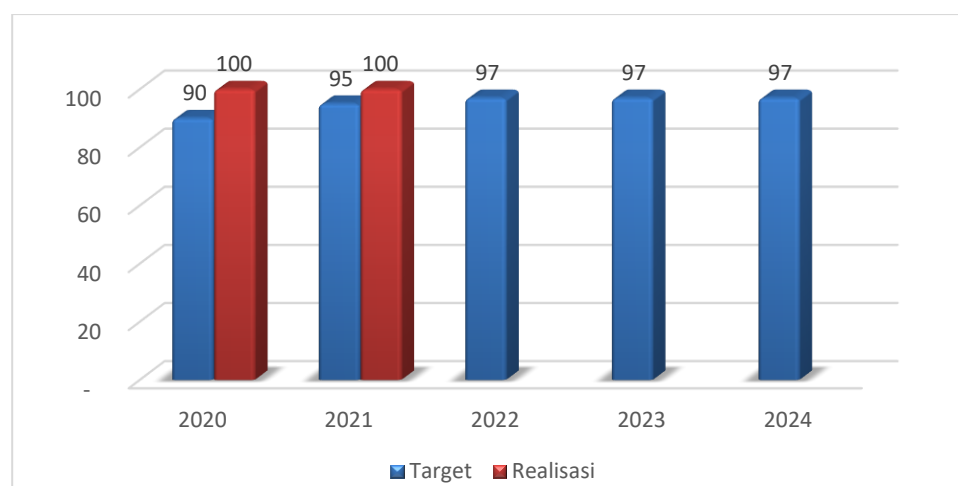


Grafik 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s.d 2021

Gambaran capaian kinerja tersebut di atas, menunjukkan bahwa semua faktor risiko yang ditemukan dapat dikendalikan dengan baik dan telah dilakukan tindakan sesuai kondisi masing-masing faktor risiko.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan Tahun kedua dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan 2021 yaitu sebesar 100 % atau 105 % dari target sebesar 95 %.



Grafik 9. Perbandingan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 dan 2021 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 97 % yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk telah dilakukan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon 1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2021. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana eselon 1 mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2021 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	89 %	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	105 %

Perbandingan capaian kinerja dengan indikator RAP dapat tercapai melebihi target nasional, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada KKP Kelas I atau II lainnya dengan target kinerja yang sama 95% dan rata-rata tercapai 100% dengan capaian kinerja 105 %, menunjukkan bahwa faktor risiko di pintu masuk negara dapat dikendalikan dengan seluruhnya.

Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil rekapitulasi data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Rata-rata Target KKP Se-Indonesia	Target Satker	Rata-rata Capaian KKP Se-Indonesia	Capaian Satker
Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	95	95	94,92	100

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 2 tercapai melebihi target satker dan rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan kinerja

Capaian indicator kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan yang tercapai 105 % dipengaruhi oleh :

- Peningkatan intensitas pengawasan lalu lintas orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebagai upaya penanganan pandemic covid-19.
- Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu sesuai Instruksi Dirjen P2P.
- Penguatan kapasitas SDM dalam penanganan KKM di Pintu masuk
- Penguatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kapasitas SDM di Pintu Masuk
- Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian risiko lingkungan hingga wilayah kerja.
- Dukungan peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di pintu masuk

Adapun upaya pengendalian yang dapat dilakukan pada masing-masing faktor risiko dapat dilihat pada matriks berikut ini :

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
Pemeriksaan Orang	Upaya Preventif	Sarana penunjang kegiatan preventif, Pelaku perjalanan kurang kooperatif dengan kegiatan preventif yang kurang menarik	Pengadaan/ Pembuatan Sarana Penunjang Kegiatan Preventif berupa Vidio Pencegahan Covid-19 yang lebih menarik	Pejabat Pengadaan, Otoritas Pelabuhan, PT. Pelido, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Studio Foto/ Vidio	Pejabat Pengadaan : Mengadakan Alat Screening yang Memadai Dinas Kesehatan : Koordinasi Peminjaman Alat Screening
	Screening	Keterbatasan Alat, Kemampuan Petugas Pelaksana Screening	Pengadaan Alat /Bahan yang sesuai standar untuk pemeriksaan screening lanjutan	Pejabat Pengadaan, Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan: Membantu Memberikan Edukasi Kepada Pelaku Perjalanan Aparat Penegak Hukum: Memberikan Perlindungan dan Keamanan Kepada Petugas Satgas Covid-19: Membantu Memberikan Edukasi Kepada Pelaku Perjalanan
	Penyelidikan Epidemiologi (PE)	Keterbatasan Alat Angkut penunjang kegiatan PE serta Akses menuju lokasi PE yang sulit dijangkau	Pengadaan Alat angkut penunjang PE yang dapat memadai dalam menjangkau lokasi PE	Pejabat Pengadaan, Dinas Kesehatan Kab/Kota	Pejabat Pengadaan : Mengadakan sarana prasarana penunjang PE Dinas Kesehatan: Membantu Memberikan Edukasi Kepada Pelaku Perjalanan dan Membantu Penyediaan sarana dan prasarana

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
	Rujukan Ke Rumah Karantina	Pelaku Perjalanan tidak Kooperatif	Diberikan edukasi kepada ybs ttg pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB (Covid-19) Melalui Media offline maupun online	Dinkes Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum dan Keamanan, Satgas Covid-19	Dinas Kesehatan: Membantu Memberikan Edukasi Kepada Pelaku Perjalanan Aparat Penegak Hukum: Memberikan Perlindungan dan Keamanan Kepada Petugas Satgas Covid-19: Membantu Memberikan Edukasi Kepada Pelaku Perjalanan
	Rujukan Ke Fasilitas Kesehatan	Pelaku Perjalanan tidak Kooperatif, Keterbatasan Tenaga Driver	Diberikan edukasi kepada ybs ttg pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB (Covid-19) Melalui Media offline maupun online, Koordinasi dengan LPLS Terkait Penyediaan Sarana Pengangkutan,	Dinkes Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum dan Keamanan, Satgas Covid-19	Dinas Kesehatan: Membantu Memberikan Edukasi Kepada Pelaku Perjalanan Aparat Penegak Hukum: Memberikan Perlindungan dan Keamanan Kepada Petugas Satgas Covid-19: Membantu Memberikan Edukasi Kepada Pelaku Perjalanan
Pemeriksaan Alat Angkut	Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Desinfeksi, Desinseksi dan Fumigasi)	Pihak owner Kapal penumpang /komersial (yang high risk) menghindari dilakukan tindakan pengendalian pada kapalnya dengan alasan kapal harus berangkat dan terancam merugi sehingga fumigasi batal dilaksanakan.	Memberikan Ijin berlayar 1x dan direkomendasikan dilakukan tindakan penyehatan (fumigasi) di pelabuhan tujuan.	Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Desinfeksi, Desinseksi dan Fumigasi)	Otoritas Pelabuhan: Membantu Mengamankan Kapal dalam rangka kegiatan penyehatan Agen Pelayaran: Melakukan Koordinasi antara Pihak Kapal dengan petugas dan Pest Kontrol yang ditunjuk dan Menyiapkan Sarana Transportasi Pest Kontrol: Melakukan Tindakan Penyehatan
	Tindakan Karantina Alat Angkut	Pihak owner Kapal penumpang /komersial (yang high risk) menghindari dilakukan tindakan Karantina Karena Terhambat Kegiatan Bongkar Muat Kapal (Mengakibatkan Over Cost)	Memberikan Edukasi Kepada Keagenan, Nahkoda/Awak Kapal ttg pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB (Covid-19)	Tindakan Karantina Alat Angkut	Otoritas Pelabuhan: Membantu Mengamankan Kapal dalam rangka kegiatan penyehatan Agen Pelayaran: Melakukan Koordinasi antara Pihak Kapal dengan petugas dan Pest Kontrol yang ditunjuk dan Menyiapkan Sarana Transportasi
Pemeriksaan Barang	Menyusun dan Menerapkan SOP Pemeriksaan Barang	Penyebarluasan SOP yang kurang maksimal	Memilih metode penyebarluasan SOP yang menarik dan mudah difahami secara keseluruhan melalui Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	Otoritas Bandara, Maskapai, Ekspedisi Jenazah	Otoritas Bandara: Melakukan Pengawasan Kegiatan Maskapai : Menyediakan Sarana Pengangkutan

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
	Pengecekan kelengkapan syarat pengiriman jenazah seperti hasil test pcr dan antigen	Masih ada jenazah yang tidak dilengkapi dengan surat hasil pcr atau antigen sesuai dengan aturan dari tim gugus covid	Soialisasi dan penyampaian informasi tentang syarat pengiriman jenazah	Maskapai, otoritas bandara, ekspedisi jenazah, rumah sakit	Otoritas Bandara: Melakukan Pengawasan Kegiatan Maskapai : Menyediakan Sarana Pengangkut Rumah Sakit : Pemeriksaan dan penyiapan packing jenazah Ekspedisi : Pengiriman/Cargo melalui Maskapai yang dipilih
Pemeriksaan Lingkungan	Memberikan rekomendasi perbaikan pada pihak pengelola sarana air bersih /minum di wilayah pelabuhan dan bandara	Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pelabuhan/ bandara	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
	Memberikan rekomendasi perbaikan pada pihak pengelola TPM di wilayah pelabuhan dan bandara	Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pelabuhan/ bandara dengan alasan keterbatasan anggaran	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
Pemeriksaan Lingkungan	Memberikan rekomendasi perbaikan pada otoritas pelabuhan dan pihak pengelola TTU di wilayah pelabuhan dan bandara	Rekomendasi perbaikan sangat jarang ditindaklanjuti oleh pihak pengelola dengan alasan keterbatasan anggaran	Pendekatan dan komunikasi langsung dengan pihak terkait	KSOP Kelas I Banjarmasin, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan dan Angkasa Pura I di bandara) : Mengelola sarpras di pelabuhan/ bandara
	Memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan penyehatan (fumigasi / desinseksi) pada kapal high risk / dijumpai investasi vektor .	Pihak owner Kapal penumpang /komersial (yang high risk) menghindar dilakukan tindakan pengendalian pada kapalnya dengan alasan kapal harus berangkat dan terancam merugi sehingga fumigasi batal dilaksanakan.	Memberikan Ijin berlayar 1x dan direkomendasikan dilakukan tindakan penyehatan (fumigasi) di pelabuhan tujuan.	KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Wilker Satui, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, Agen Pelayaran kapal yang bersangkutan , Pest Control yang ditunjuk	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan) : Mengelola sarpras di pelabuhan termasuk jadwal waktu dan tempat sandar kapal di dermaga pelabuhan. Pest Control : Pelaksana fumigasi /desinseksi

Faktor Risiko (FR)	Upaya Pengendalian Yang Dilakukan	Masalah / Kendala Yang Dihadapi	Pemecahan Masalah	LP/LS Yang Dilibatkan Dalam Pemecahan Masalah	Peran LP/LS
	Memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan pengendalian (desinfeksi) pada kapal high risk dijumpai indikasi PHEIC (covid19)	Kapal penumpang / komersial yang bersangkutan tidak bisa sandar terlalu lama di pelabuhan, karena jadwal keberangkatan yang tidak bisa ditunda atau dibatalkan	Desinfeksi dilakukan sendiri oleh pihak owner kapal yang bersangkutan, dan KKP Kelas II Banjarmasin dipastikan mendapat laporan hasil kegiatannya	KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Wilker Pel Kotabaru, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cab Banjarmasin, Agen Pelayaran kapal yang bersangkutan, Pest Control yang ditunjuk	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan) : Mengelola sarpras di pelabuhan termasuk jadwal waktu dan tempat sandar kapal di dermaga pelabuhan. Agen Pelayaran : menyediakan akomodasi transportasi ke lokasi kapal. Pest Control : Pelaksana fumigasi /desinseksi
	Melakukan tindakan pengendalian vektor berupa larvaciding dan fogging di wilayah buffer pengawasan pelabuhan /bandara yang tidak memenuhi syarat (HI > 1)	Masyarakat menganggap fogging lebih efektif menekan penyebaran vektor DBD (lebih menyukai Fogging daripada larvaciding), bila ada RT yang difogging maka RT lain akan minta difogging walaupun HI masih memenuhi syarat (HI < 1)	Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kader kesling yang telah dilatih	KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin, KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap, Kelurahan setempat, dan Puskesmas setempat	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan) : Mengelola sarpras di pelabuhan termasuk jadwal waktu dan tempat sandar kapal di dermaga pelabuhan. Agen Pelayaran : menyediakan akomodasi transportasi ke lokasi kapal. Puskesmas : Membantu edukasi kader
		SDM yang terlatih tentang alat fogging (service dan perbaikan alat) masih kurang	Peningkatan SDM Entomolog Kesehatan dan Sanitarian berupa pelatihan tentang alat /mesin fogging	Direktorat P2PTVZ, Balai Litbangkes	Direktorat P2PTVZ :Pengawasan dalam Menyelenggarakan pelatihan. Balai Litbangkes: Menyelenggarakan Pelatihan
	Mengikutsertakan warga masyarakat dengan mengaktifkan kader kesehatan lingkungan dalam mewujudkan wilayah bebas vektor DBD di daerah buffer wilayah pengawasan KKP di pelabuhan /bandara	Sulit mendapatkan kader laki - laki, sebagian besar kader yang dilatih adalah ibu-ibu sehingga agak merepotkan pada saat dilakukan kegiatan yang perlu kekuatan fisik (misal: fogging)	Memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendukung tugas kader kesling dalam rangka mewujudkan wilayah bebas vektor DBD	KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Cabang Kotabaru, KSOP Cabang Batulicin, KSOP Cabang Sungai Danau, KSOP Cabang Kintap, Kelurahan setempat, dan Puskesmas setempat	KSOP : Administrator Pelabuhan /melakukan pengawasan. Otoritas Pelabuhan (Pelindo III di Pelabuhan) : Mengelola sarpras di pelabuhan termasuk jadwal waktu dan tempat sandar kapal di dermaga pelabuhan. Agen Pelayaran : menyediakan akomodasi transportasi ke lokasi kapal. Puskesmas : Membantu Memberikan edukasi

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
 AA : Alokasi Anggaran Per Indikator
 Ci : % Capaian Indikator
 RA : Realisasi Anggaran Per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$16,54 \% = \frac{((Rp. 245,830,000 \times 1.05) - Rp. 217,251,474)}{Rp. 245,830,000} \times 100\%$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat tercapai sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 105 % dari target yang telah ditetapkan 95 % dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 217,251,474,- atau 88.46 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 245,830,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16.54 % untuk capaian kinerja sebesar 105 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah adanya pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan yang bersifat sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dan pembiayaan terintegrasi dengan penanganan covid-19, adanya perbedaan tarif pemeriksaan sampel faktor risiko lingkungan antara layanan BBTCL PP Banjarbaru dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalsel, selain juga adanya anggaran kegiatan terkait embarkasi haji (pertemuan penjamah catering haji Tahun 2021) yang batal dilaksanakan Tahun ini. Selama masa pandemic COVID-19, kegiatan yang bersifat tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, advokasi, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara terintegrasi, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pelayanan Kegawatdaruratan dan Rujukan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka lanjutan dari upaya deteksi dini terhadap kasus gangguan kesehatan / kegawatdaruratan / kemungkinan ditemukan kasus *suspect* penyakit menular di pintu masuk Bandara/Pelabuhan yang memerlukan tindakan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan yang tercapai sebanyak 19 layanan atau 126,7 % dari target 15 layanan.

2) Pengendalian Vektor DBD

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit DBD di pintu masuk Bandara/Pelabuhan berupa melaksanakan fogging (pengasapan) di area perimeter pelabuhan dan bandara dengan target seluas 38 Hektar sebagai tindakan kewaspadaan dini dan atau fogging fokus / sewaktu – waktu bila terjadi kasus DBD (kejadian luar biasa) di area buffer . Fogging pengendalian faktor risiko penyakit DBD Tahun ini terlaksana seluas 38 hektar (100 %).

3) Pengendalian Vektor Diare

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit diare di pintu masuk Bandara/Pelabuhan berupa Spraying Lalat, yaitu melakukan pengendalian lalat dengan alat spray can dan insectisida cair (Solfac) bila hasil pengukuran kepadatan lalat Tinggi (> 2 ekor) tercapai seluas 21 hektar (100 %).

4) Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian faktor risiko lingkungan di pintu masuk dan embarkasi, seperti pemeriksaan dan pengendalian sanitasi

lingkungan asrama haji yang dilakukan survey pendahuluan sebelum adanya kebijakan pembatalan keberangkatan calon jamaah haji, tindakan penyehatan risiko lingkungan melalui kegiatan desinfeksi lingkungan instansi / pelabuhan / bandara, pengawasan kualitas pemeriksaan kualitas makanan, pemeriksaan kualitas tempat-tempat umum, pemeriksaan kualitas udara dan kebisingan, pengawasan dan pengendalian limbah B3, uji resistensi insektisida dan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sebanyak 2 layanan (100 %).

Indikator Ketiga :

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

a. Pengertian

Adalah angka capaian pengendalian faktor risiko berdasarkan faktor risiko yang ditemukan sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di pintu masuk.

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu Tahun.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Akumulasi persentase target dan capaian:

- 1) Kelengkapan data surveilans
- 2) Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam,
- 3) Penyusunan Rencana Kontigensi
- 4) Indeks pinjal ≤ 1 (pelabuhan/bandara)
- 5) HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara)
- 6) Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara)
- 7) Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara)
- 8) Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara)
- 9) TTU memenuhi syarat (titik)
- 10) TPM layak higiene (titik)
- 11) Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \%C$$

Keterangan :

A = Jumlah indeks pengendalian faktor risiko

B = Jumlah indeks pengendalian faktor risiko yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian indeks pengendalian faktor risiko

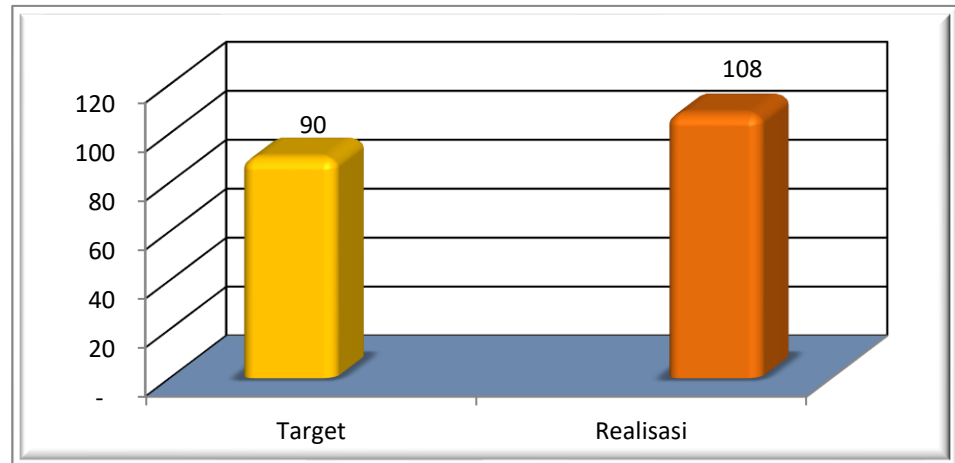
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara selama Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{108\%}{90\%} \times 100\% = 120\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 10. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

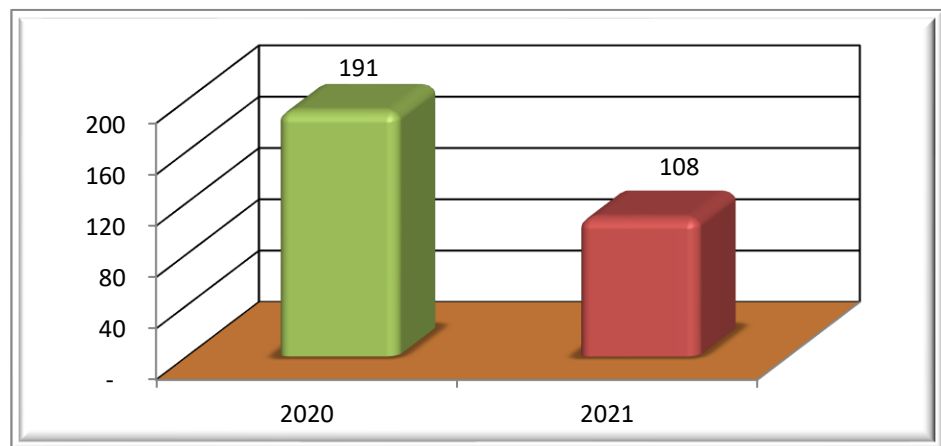
Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 108 % dari indeks pengendalian faktor risiko atau 120 % dari target yang ditetapkan, dimana pada jumlah kelengkapan data surveilans terdapat capaian yang cukup besar karena adanya beberapa rekomendasi yang dibuat untuk penanganan pandemic covid-19 di pintu masuk.

Adapun data rincian hasil kegiatan yang menghasilkan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara selama Tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan	Target Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	% Capaian
Kelengkapan data surveilans	8	13	163
Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	12	13	108
Penyusunan rencana kontigensi	0	0	0
Indeks pinjal ≤ 1	65	65	100
HI perimeter = 0	90	90	100
Tidak ditemukan larva anopheles	12	12	100
kepadatan kecoa rendah	0	0	0
kepadatan lalat < 2	49	49	100
TTU memenuhi syarat	264	264	100
TPM laik hygiene	324	324	100
Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	192	192	100

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 masih sama dengan 2020 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2020 tercapai 191 % dan Tahun 2021 tercapai 108 % dari target yang ditetapkan.



Grafik 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 dan 2021

Adanya perbedaan lingkup indikator kinerja kegiatan ini dengan tahun sebelum 2020, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja kegiatan. Namun, apabila dilihat dari perbandingan 2020 dan 2021, dari grafik 11 menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun sebelumnya karena kondisi pandemi covid-19 Tahun 2020 terdapat revisi / perubahan target dari 85% menjadi 80%, dimana penanganan sinyal SKD KLB Covid-19 yang meningkat tajam dari target yang ditetapkan sebesar 1300%, sehingga mempengaruhi peningkatan capaian kinerja sebesar 191% dari target 80%. Berbeda dengan Tahun 2021, tidak terdapat perubahan target kinerja mengingat kondisi pandemi covid-19 mulai terkendali, namun capaian kinerja dapat tercapai 108% dari target 90% karena adanya beberapa rekomendasi yang dibuat untuk penanganan pandemi covid-19 di pintu masuk yang tercapai 163% tertinggi dari capaian beberapa kegiatan yang termasuk dalam indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara.

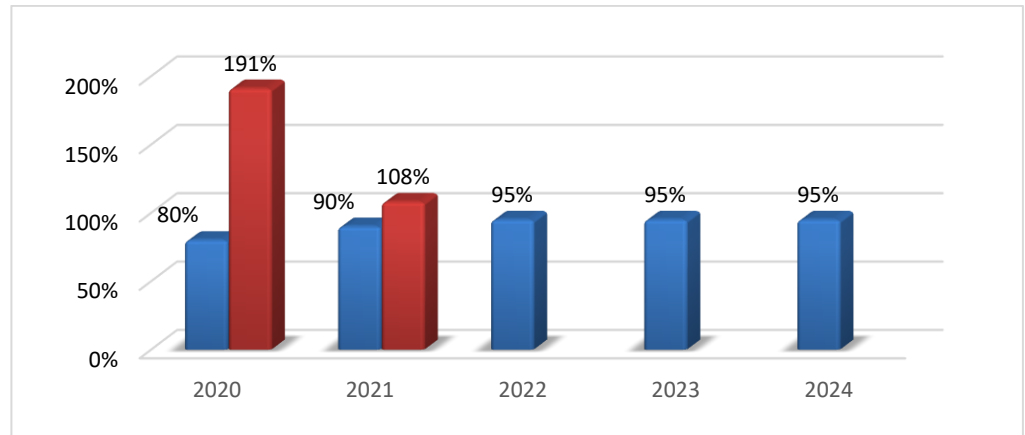
Namun apabila dilihat dari data rincian hasil Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara, capaian masing-masing kegiatan selama Tahun 2019 –

2021, menunjukan bahwa indeks pengendalian faktor risiko pada Tahun 2021 untuk kelengkapan data surveilans mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019-2020 dikarenakan semakin bertambahnya jumlah fungsional di lingkungan KKP Banjarmasin yang memiliki kemampuan dalam pengolahan dan analisis data serta membuat rekomendasi untuk temuan kasus di lapangan. Untuk jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan penanganan pandemi covid-19 yang mulai terkendali sehingga jumlah sinyal yang direspon menjadi berkurang. Sedangkan, untuk pengendalian vektor dan lingkungan dibandingkan Tahun 2019–2020 rata-rata capaian sesuai target dan terdapat perluasan sasaran titik/lokasi pengawasan, hanya saja terdapat perbedaan capaian kinerja yang cukup besar untuk titik/lokasi pengendalian TPM yang mengalami penurunan disebabkan karena banyaknya TPM di wilayah kerja Bandara Syamsuddin Noor yang tidak beroperasi lagi sebagai dampak pandemi covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini data perbandingan hasil indeks pengendalian faktor risiko :

Kegiatan	Indeks Pengendalian Faktor Risiko		
	2019	2020	2021
Kelengkapan data surveilans	1	1	13
Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	6	26	13
Penyusunan rencana kontigensi	1	0	0
Indeks pinjal ≤ 1	122	65	65
HI perimeter = 0	38	90	90
Tidak ditemukan larva anopheles	12	12	12
kepadatan kecoa rendah	12	0	0
kepadatan lalat < 2	108	49	49
TTU memenuhi syarat	252	252	264
TPM laik hygiene	432	432	324
Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	108	164	192

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan Tahun kedua dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 108% atau 120 % dari target sebesar 90 %.



Grafik 12. Perbandingan Realisasi Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 dan 2021 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 95% yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon 1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga. Untuk mengetahui sejauh mana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2020. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana eselon 1 mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2021 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	89 %	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	120%

Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil rekapitulasi data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Rata-rata Target KKP Se-Indonesia	Target Satker	Rata-rata Capaian KKP Se-Indonesia	Capaian Satker
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90	90	88,75	107,87

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 3 tercapai melebihi target satker dan rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan kinerja

Capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara yang tercapai 120 % dipengaruhi oleh :

- Peningkatan intensitas pengawasan lalu lintas orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebagai upaya penanganan pandemi covid-19.
- Peningkatan tindakan pengendalian alat angkut dan lingkungan berupa desinfeksi berkala dalam rangka pencegahan penularan covid-19 di pintu masuk.
- Peningkatan jejaring dan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam rangka peningkatan pengawasan di pintu masuk sesuai Instruksi Dirjen P2P.
- Penguatan kapasitas SDM dalam penanganan KKM di Pintu masuk.
- Penguatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kapasitas SDM di Pintu Masuk.
- Perluasan titik atau lokasi cakupan pengawasan dan pengendalian risiko lingkungan hingga wilayah kerja.
- Dukungan peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di pintu masuk.
- Komitmen bersama para pelaksana program pada seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan kinerja dan realisasi anggaran sesuai tugas dan fungsi kelompok substansinya.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- Tidak sinkronnya aturan pusat dan daerah dan terlalu sering mengalami perubahan, sehingga menyulitkan petugas dalam menerapkan peraturan.
- Kesulitan koordinasi lintas sektor karena adanya perubahan peraturan.
- Kurangnya jumlah SDM dalam rangka peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut selama pandemi covid-19 di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

Pemecahan Masalah :

- Mengaktifkan sistem komunikasi cepat untuk melakukan *update* informasi dan menyeragamkan pemahaman terkait peraturan yang berlaku.

- b) Menyampaikan laporan secara berjenjang dari level petugas hingga ke pemangku kebijakan.
- c) Melakukan koordinasi secara virtual atau komunikasi cepat dengan lintas sektor terkait.
- d) Menambah jumlah SDM dengan rekrutmen tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan alat angkut di pintu masuk pelabuhan dan bandara.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian alokasi anggaran indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja dikurang realisasi anggaran indikator kinerja dibagi alokasi anggaran per indikator kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

AA : Alokasi Anggaran Per Indikator

Ci : % Capaian Indikator

RA : Realisasi Anggaran Per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$20.98 \% = \frac{((Rp. 100,690,000 \times 1.20) - Rp. 99,702,100)}{Rp. 100,690,000} \times 100\%$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara dapat tercapai sebesar 108% dengan capaian kinerja sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.99,702,100,- atau 99,02 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 100,690,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20.98 % untuk capaian kinerja sebesar 120 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pertimbangan sasaran yang sama dan keterbatasan tenaga pelaksana. Selama masa pandemi covid-19, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi serta peningkatan SDM dapat diikuti secara *virtual meeting* melalui aplikasi zoom atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan maupun lintas sektor serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah sangat menunjang pelaksanaan tugas pengendalian faktor risiko di pintu masuk.

Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara melalui kegiatan Pelatihan Bidang Kesehatan. Adapun pelatihan yang telah diikuti sebanyak 10 orang tercapai melebihi target yaitu sebesar 14 orang (140%).

Pelatihan Bidang Kesehatan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas dalam melaksanakan pengendalian faktor risiko di pintu masuk dengan hasil indeks sebagai berikut :

1) Kelengkapan Data Surveilans

Kegiatan ini berupa pengawasan orang, alat angkut dan barang, dimana dengan meningkatnya kasus Covid-19 pada Tahun 2021, semakin ketat pula pengawasan terhadap lalu lintas orang, barang dan alat angkut. Adapun yang menjadi kelengkapan data tersebut berupa laporan pengawasan terhadap lalu lintas orang maupun alat angkut yang datang dari daerah terjangkit dan terindikasi Covid-19 tercapai sebesar 13 (163%) dari target 8. Dari kegiatan pengawasan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi dari pejabat fungsional, diantaranya :

a) Fungsional Epidemiolog

- (1) Menerbitkan Izin Lepas Terbatas Karantina (*Restricted Pratique*) karena mengalami kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau faktor risikonya dimana kapal diharuskan untuk berlabuh di luar area pelabuhan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas kecuali memberikan suplai logistik atau perbekalan, baik air maupun makanan.

- (2) Memberikan rekomendasi untuk dilakukan prosedur karantina pada penderita dengan hasil PCR Positif Covid-19 yang tanpa gejala maupun yang menunjukkan gejala ringan selama minimal 14 hari.
- b) Fungsional Dokter
 - (1) Melakukan tes antigen pada seluruh ABK Kapal.
 - (2) Melanjutkan tes PCR pada ABK dengan hasil antigen positif.
 - (3) Melakukan tindakan rujukan kepada penderita dengan hasil PCR positif dan menunjukkan gejala berat.
- c) Fungsional Entomolog/Sanitarian
 - Melakukan disinfeksi pada alat angkut.

2) Respon Sinyal SKD KLB dan Bencana Kurang dari 24 Jam

Kegiatan ini berupa pengawasan orang, alat angkut dan barang. Adapun yang menjadi kelengkapan data tersebut berupa laporan pengawasan terhadap lalu lintas orang maupun alat angkut yang datang dari daerah terjangkit dan terindikasi Covid-19. Adanya sinyal SKD Kasus tersebut segera direspon kurang dari 24 jam, kegiatan ini tercapai sebesar 13 (108%) dari target 12 dalam satu Tahun.

3) Penyusunan Rencana Kontigensi

Kegiatan ini berupa rencana sistematis dalam menangani situasi darurat bencana khususnya di bidang kesehatan/penyakit dengan membuat suatu dokumen yang disusun dan disepakati yang akan didayagunakan untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi kritis atau darurat dengan melibatkan lintas sektor (Dinas Kesehatan, PT. Angkasa Pura, PT. Pelindo, KSOP, Kantor Imigrasi, Kantor PPBC, Rumah Sakit, dan sektor lainnya yang berkaitan). Kegiatan ini pada Tahun 2021 tidak dilaksanakan dikarenakan pelabuhan/bandara yang dilewati oleh lalu lintas orang telah memiliki dokumen rencana kontigensi seperti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, Pelabuhan Kotabaru dan Batulicin.

4) Indeks Pinjal ≤ 1

Indeks Pinjal (IP) dapat diketahui dari jumlah pinjal pada tikus yang tertangkap selama dilakukan survei pemasangan perangkap tikus. Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas vektor Pes telah dilakukan pemasangan perangkap tikus seluas 65 hektar seTahun yang terlaksana 100 % dan berhasil mencapai target index pinjal < 1 .

5) HI perimeter = 0

House Index (HI) dapat diketahui dari hasil survey vektor DBD. Dalam mewujudkan wilayah bebas vektor DBD telah dilakukan survey jentik vektor DBD (*Aedes aegypti*) seluas 90 hektar seTahun yang dilakukan oleh kader

lingkungan setempat telah terlaksana 100 % dan berhasil memenuhi house index perimeter (bangunan dijumpai jentik vektor DBD) = 0 atau wilayah pelabuhan bebas vektor DBD.

6) Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Survey vektor Anopheles yang dilakukan seluas 12 hektar seTahun telah terlaksana 100 % dan menunjukkan MDH = 0 atau tidak ditemukan Larva Anopheles di semua wilayah kerja KKP Kelas II Banjarmasin, sehingga berhasil diwujudkan wilayah bebas vektor Malaria.

7) Kepadatan Kecoa Rendah

Kegiatan ini tidak menjadi target prioritas pada Tahun 2021 dan tidak adanya anggaran yang termuat dalam pelaksanaan survei kecoa sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

8) Kepadatan Lalat < 2

Kegiatan survei vektor diare dilaksanakan pada area seluas 28 hektar dalam satu Tahun dan pengendalian vektor diare seluas 21 hektar dalam satu Tahun, total seluas 49 hektar selama satu Tahun terlaksana 100 % dan menunjukkan kepadatan lalat di semua wilayah kerja pelabuhan /bandara < 2 (Rendah), sehingga wilayah bebas vektor diare dapat diwujudkan.

9) TTU Memenuhi Syarat

Hasil inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum di pelabuhan/bandara sebanyak 264 lokasi dalam masa satu Tahun terlaksana 100 % dan menunjukkan hasil baik atau semua Tempat-Tempat Umum di wilayah kerja KKP Kelas II Banjarmasin memenuhi syarat sehingga dapat diwujudkan wilayah Pelabuhan/Bandara sehat.

10) TPM Laik Hygiene

Hasil inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan di pelabuhan /bandara sebanyak 324 lokasi seTahun terlaksana 100 % dan menunjukkan hasil Baik, atau semua TPM di wilayah kerja KKP Kelas II Banjarmasin Memenuhi Syarat, sehingga dapat diwujudkan wilayah Pelabuhan / Bandara Sehat.

11) Kualitas Air Bersih memenuhi syarat kesehatan

Pemeriksaan kualitas sampel air bersih secara bakteriologis telah dilakukan sebanyak 192 sampel seTahun telah terlaksana 100 %. Semua sampel yang diperiksa menunjukkan hasil baik atau kualitas air bersih di wilayah kerja pelabuhan/ bandara telah memenuhi syarat kesehatan.

2. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Indikator Pertama :

Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Adalah adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran berdasarkan hasil perhitungan realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA.

b. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan 4 parameter yaitu realisasi anggaran, capaian rincian output (CRO), konsistensi RPD, efisiensi CRO dan nilai efisiensi yang dikalikan masing-masing bobot.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Hasil capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam dokumen anggaran, dimana prosesnya melalui pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan, yang merupakan perbandingan antara capaian NKA dengan target yang ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA

B = Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian Capaian kinerja Aplikasi SMART DJA

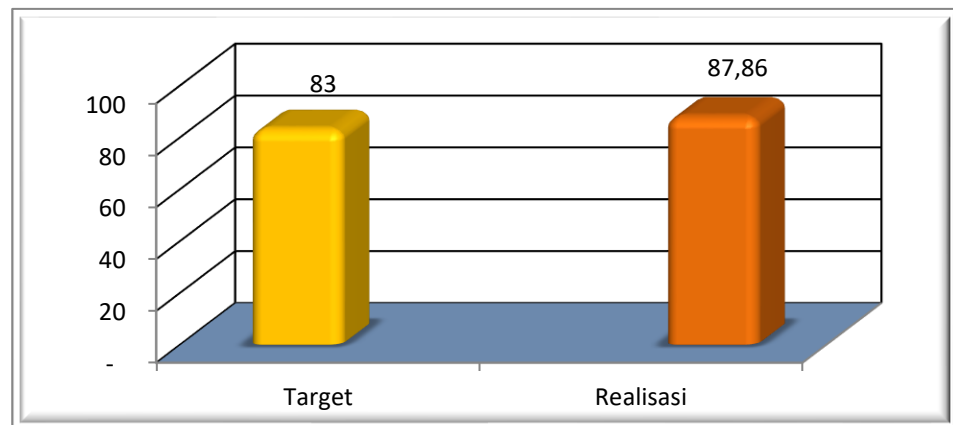
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran selama Tahun 2020 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{87.86}{83} \times 100\% = 106 \%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

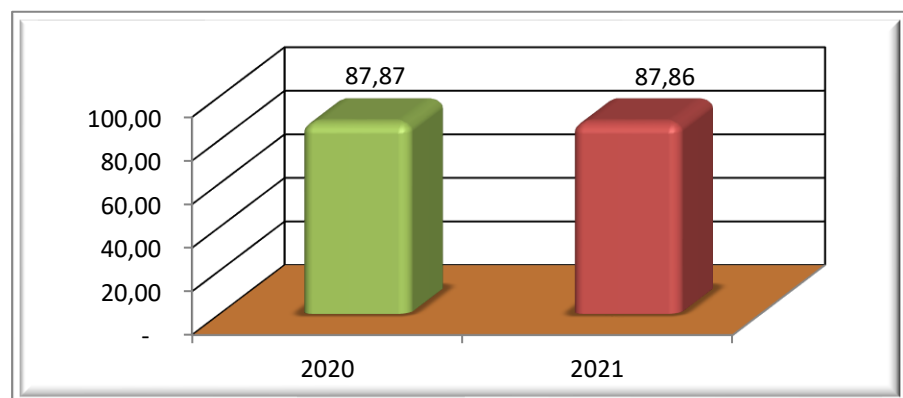


Grafik 13. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 106 %, yang merupakan hasil perhitungan penyerapan sebesar 97.64 %, konsistensi sebesar 98.27 %, CRO sebesar 100 %, efisiensi sebesar 3.79 % dan nilai efisiensi sebesar 59.47 %.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 masih sama dengan 2020 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Capaian indikator kinerja kegiatan ini pada Tahun 2020 tercapai 87.87 dan Tahun 2021 tercapai 87.86 dari target yang ditetapkan. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 dan 2021

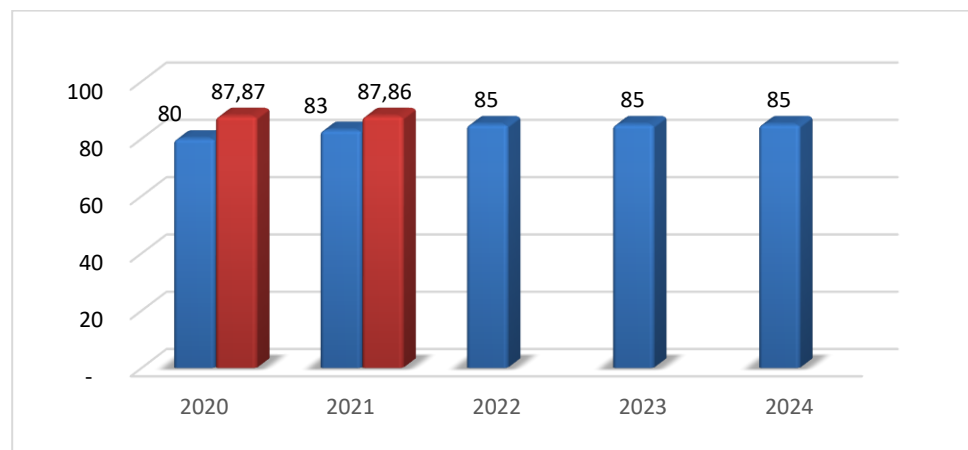
Dari grafik 14, menunjukkan adanya konsistensi realisasi kinerja dari Tahun 2020 hingga 2021 yang berbeda 0.01. Untuk lebih jelasnya, rincian capaian kinerja anggaran dapat dilihat pada data berikut ini :

No	Parameter Penilaian	Nilai	
		2020	2021
1	Penyerapan	96.02	97.64
2	Konsistensi	98.40	98.27
3	Capaian Output (CO) / Capaian Rincian Output (CRO)	100	100
4	Efisiensi	3.98	3.79
5	Nilai Efisiensi	0	59.47
	Nilai Kinerja Anggaran	87.87	87.86

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 nilai capaian output, sedangkan Tahun 2021 nilai rincian output dan terdapat penambahan parameter penilaian yaitu nilai efisiensi. Perubahan penilaian ini sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan Tahun kedua dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 87.86 atau 106 % dari target sebesar 83.



Grafik 15. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 dan 2021 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 85 yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 -2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan capaian rincian output dapat tercapai secara optimal dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola program, pengelola money dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan meskipun kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon 1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2020. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana eselon 1 mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2021 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	88 %	Nilai Kinerja Anggaran	106

Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil rekapitulasi data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Rata-rata Target KKP Se-Indonesia	Target Satker	Rata-rata Capaian KKP Se-Indonesia	Capaian Satker
Nilai Kinerja Anggaran	83	83	65,78	87,86

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 4 tercapai melebihi target satker dan rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Penurunan kinerja

Capaian indicator kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang tercapai 106 % mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yang tercapai 106 %, hal ini dipengaruhi oleh :

- a) Adanya perbedaan target nilai kinerja anggaran dengan tahun sebelumnya.

- b) Adanya belanja pegawai yang tidak dapat direalisasikan karena adanya pegawai yang pindah kerja, meninggal dunia, cuti diluar tanggungan Negara (CTLN) dan pensiun..
- c) Adanya pandemic covid-19, namun optimalisasi pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan melalui realokasi anggaran meningkatkan capaian rincian output.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- a) Konsistensi pelaksanaan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA
- b) Efisiensi pada bulan berjalan belum menunjukkan efisiensi sesungguhnya, sehingga nilai kinerja anggaran pada bulan berjalan sering nilai fluktuatif.
- c) Capaian melebihi target dianggap sebagai data anomali.

Pemecahan Masalah :

- a) Komitmen pengelola program dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- b) Adanya menu pilihan tambahan untuk dapat melihat rekap nilai kinerja anggaran per bulan.
- c) Menyampaikan masukan ke Ditjen P2P terkait perubahan kriteria penilaian data anomali.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

AA : Alokasi Anggaran Per Indikator

Ci : % Capaian Indikator

RA : Realisasi Anggaran Per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$6.27 \% = \frac{((Rp. 413,580,000 \times 1.06) - Rp. 412,475,933)}{Rp. 413,580,000} \times 100\%$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran dapat tercapai sebesar 87.86 atau 106% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.412,475,933,- atau 99.73 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 413,580,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6.27 % untuk capaian kinerja sebesar 106 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara *virtual meeting* melalui aplikasi zoom atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Rencana Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersusun dokumen RKAKL Satker melalui kegiatan penyusunan e-renggar, penyusunan renja KL / RKAKL, dan koordinasi perencanaan program sebanyak 2 layanan.

2) Penyusunan Data dan Informasi Pengendalian Penyakit

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga perbantuan teknis untuk pengelolaan data dan membantu dalam penanganan covid-19 di pintu masuk dalam upaya mengatasi keterbatasan tenaga pelaksana sebanyak 1 layanan.

3) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan baik melalui aplikasi SMART DJA, Monev Bappenas, Monev E-Performance, dan kompilasi laporan dalam bentuk Laporan Tahunan, Indikator Kinerja, Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja melalui kegiatan : penyusunan laporan pelaksanaan program, penyusunan laporan e-monev penganggaran, penyusunan laporan e-monev Bappenas / P 39 Tahun 2006, penyusunan laporan Tahunan satker, penyusunan laporan indikator RAK, penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja sebanyak 19 dokumen.

Indikator Kedua :**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)****a. Pengertian**

Adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

b. Definisi Operasional

Nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satker dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan nilai total dengan nilai bobot.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di hitung berdasarkan perbandingan total akhir 4 kriteria yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan atau 13 parameter dengan target yang ditetapkan.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Capaian Nilai IKPA

B = Nilai IKPA yang ditargetkan

% C = Persentase Capaian Nilai IKPA

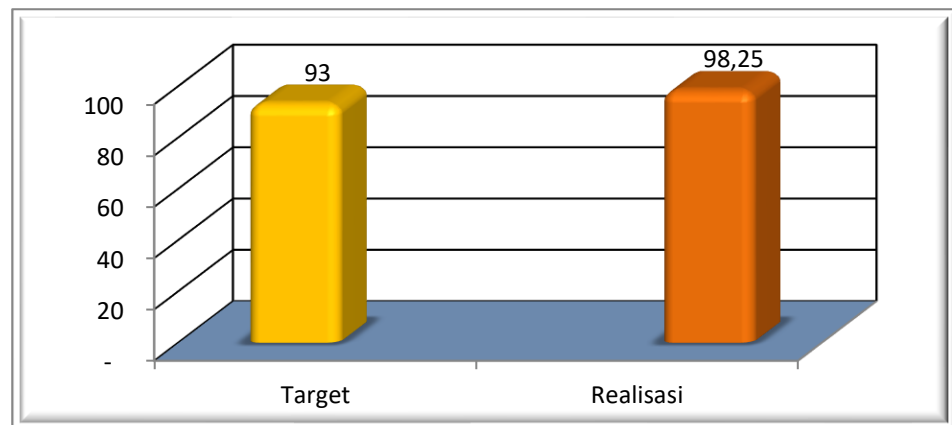
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{98.25}{93} \times 100\% = 106\%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 16. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 106 %.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan ini Tahun 2020 yang awalnya 11 parameter menjadi 13 parameter penilaian tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan karena adanya kebijakan relaksasi penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan hingga triwulan III dan kebijakan Ditjen P2P melakukan perubahan indikator menjadi Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan akibat pandemi covid-19. Namun hasil penilaian IKPA masih dapat terlihat pada aplikasi MoneV Anggaran DJA karena pada triwulan IV telah dilakukan penilaian IKPA kembali, dimana indikator ini tercapai 98.66. Sedangkan Tahun 2021 indikator ini kembali ditetapkan sebagai

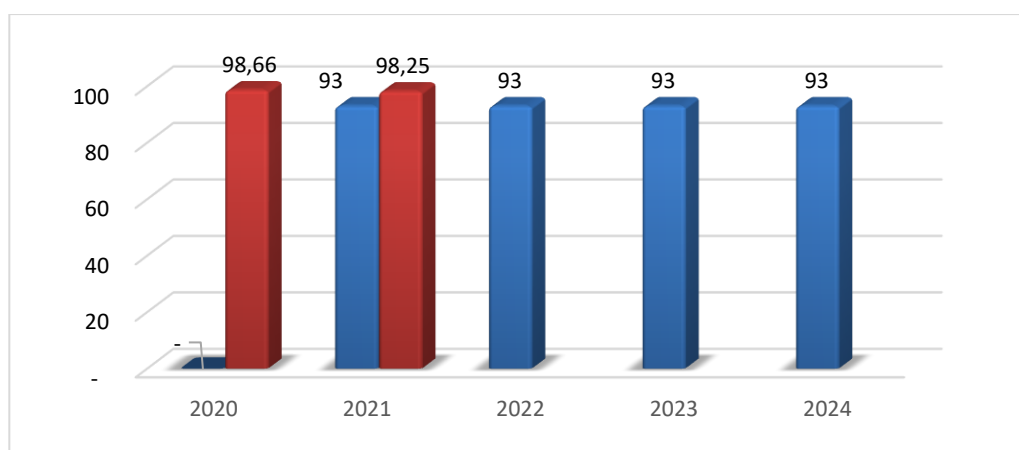
indikator kinerja kegiatan dengan 13 parameter penilaian dan tercapai 98.25 dari target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, rincian capaian 4 kriteria penilaian dengan 13 parameter dapat dilihat pada data berikut ini :

No	Parameter Penilaian	Nilai	
		2020	2021
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	97.67	96.56
1	Revisi DIPA	100	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	93.02	89.68
4	Pagu Minus	100	100
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi	97.22	100
1	Data Kontrak	100	100
2	Pengelolaan UP dan TUP	88.89	100
3	LPJ Bendahara	100	100
4	Dispensasi SPM	100	100
C	Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	100	99.34
1	Penyerapan Anggaran	100	97.36
2	Penyelesaian Tagihan	100	100
3	Capaian Output	100	100
4	Retur SP2D	100	100
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	95	85
1	Renkas	0	0
2	Kesalahan SPM	95	85
	Nilai IKPA	98.66	98.25

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 nilai IKPA lebih tinggi 0.41 point dibandingkan Tahun 2021.

5) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan Tahun pertama dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 98.25 atau 106 % dari target sebesar 93.



Grafik 17. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 dan 2021 meskipun Tahun

2020 tidak ada target, namun capaian hingga Tahun 2021 telah tercapai melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 93 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 -2024. Hal ini menunjukkan bahwa 4 kriteria penilaian dapat terpenuhi dengan baik dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola keuangan dan Tim SAI, pengelola program, dan pengelola monev meskipun kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir.

6) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon 1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2020. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana eselon 1 mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2021 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	88 %	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	106

Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil rekapitulasi data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Rata-rata Target KKP Se-Indonesia	Target Satker	Rata-rata Capaian KKP Se-Indonesia	Capaian Satker
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93	78,14	98,25

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 5 tercapai melebihi target satker dan rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Capaian indicator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tercapai 106 % dipengaruhi oleh :

- Adanya kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- a) Masih adanya deviasi halaman III DIPA
- b) Masih adanya kegiatan tidak terserap di beberapa kegiatan
- c) Masih adanya ketidakcermatan operator SAS dalam pembuatan SPM

Pemecahan Masalah :

- a) Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan atau apabila ada perubahan rencana penarikan dana.
- b) Melakukan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran kegiatan.
- c) Meningkatkan ketelitian dan kecermatan operator dalam pembuatan SPM.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

AA : Alokasi Anggaran Per Indikator

Ci : % Capaian Indikator

RA : Realisasi Anggaran Per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$8.61\% = \frac{((Rp. 12,775,388,000 \times 1.06) - Rp. 12,441,855,123)}{Rp. 12,775,388,000} \times 100\%$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat tercapai sebesar 87.86 atau 106% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.12,441,855,123,- atau 97.39 % dari pagu anggaran sebesar

Rp. 12,775,388,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8.61 % untuk capaian kinerja sebesar 106 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara *virtual meeting* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

h. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Layanan Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 1 Tahun.

b) Layanan Sarana Internal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemenuhan peralatan fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berupa pengadaan peralatan *health security*, pengadaan perangkat pengolah data, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, pengadaan ambulance paramedic, dan pengadaan perangkat pengolah data pelayanan kekarantina kesehatan.

c) Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan terlaksananya penyusunan realisasi anggaran/bulanan/triwulan/semester/Tahunan, verifikasi dan rekonsiliasi LK UAPPA Eselon 1 Laporan Keuangan Satker Pusat dan UPT, rekonsiliasi pengelolaan PNBPN, konsultasi/koordinasi permasalahan pengelolaan/pelaporan PNBPN, penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan serta dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN.

Indikator Ketiga :

Kinerja implementasi WBK satker

a. Pengertian :

Adalah hasil penilaian kinerja atas implementasi WBK pada satker berdasarkan unsur penilaian manajemen perubahan, penataan tatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Nilai kinerja implementasi WBK

B = Nilai kinerja implementasi WBK yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian kinerja implementasi WBK

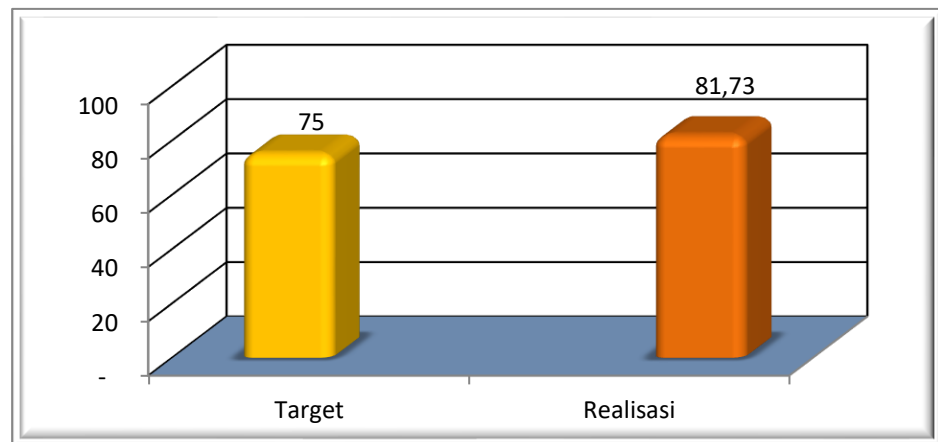
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa kinerja implementasi WBK satker selama Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{81.73}{75} \times 100\% = 109 \%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

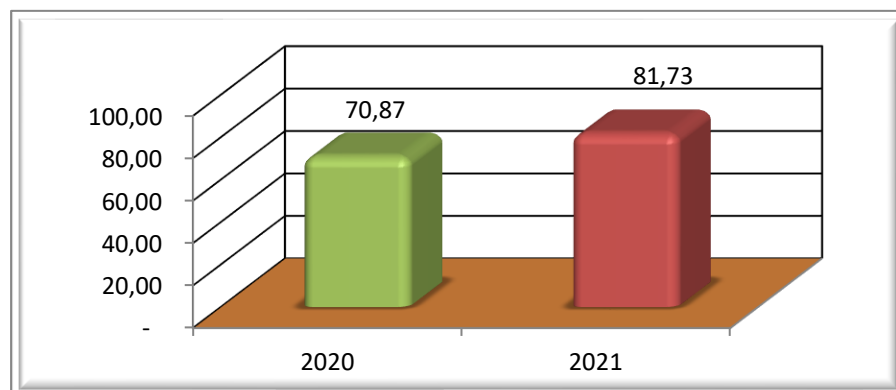


Grafik 18. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja implementasi WBK satker dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 109 % karena adanya pendampingan dari Tim Hukormas Ditjen P2P sehingga mempengaruhi kinerja Pokja WBK dalam memenuhi persyaratan kriteria penilaian Satker WBK.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu kinerja implementasi WBK satker Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 masih sama dengan 2020 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Capaian indikator kinerja kegiatan ini hasil *pre assessment* pada Tahun 2020 tercapai 70.87 meskipun tercapai di atas target 70 tetapi belum memenuhi syarat sebagai satker WBK dengan standar minimal 75, sedangkan Tahun 2021 hasil *pre assessment* Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes pada Bulan Agustus 2021 tercapai 72.38 belum juga memenuhi syarat dan hasil pendampingan oleh Tim Hukormas Ditjen P2P pada bulan November 2021 tercapai 81.73 telah berhasil memenuhi syarat, namun belum dilakukan penilaian ulang Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

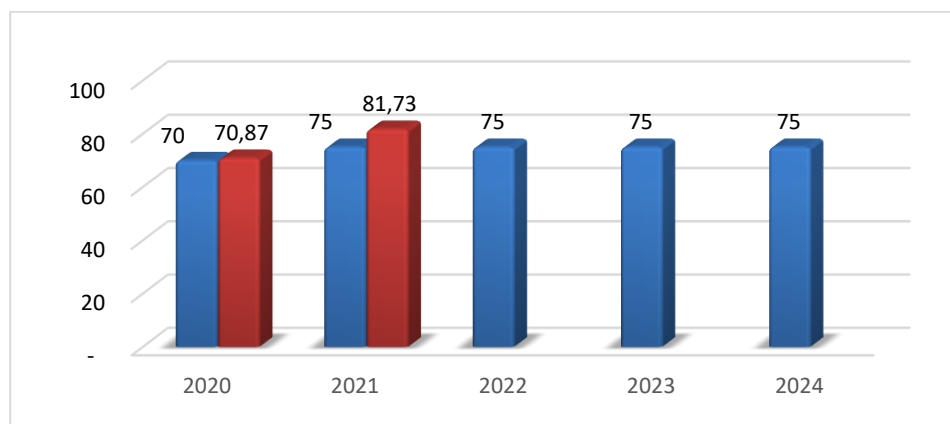


Grafik 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 dan 2021

Dari grafik 19, menunjukan adanya peningkatan atau perubahan manajemen menuju satker WBK. Belum terpenuhinya syarat sebagai satker WBK karena terdapat 2 Pokja yang masih dibawah standar penilaian 60 dan masih memerlukan perbaikan dalam implementasi berbagai kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

7) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan Tahun kedua dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 81.73 atau 109 % dari target sebesar 75.



Grafik 20. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan hasil penilaian hingga Tahun 2021 hasil penilaian Tim Penilai Internai Itjen Kemenkes telah tercapai sebesar 72.38 yang masih dibawah target 75. Sedangkan hasil penilaian Tim Hukormas Ditjen P2P tercapai sebesar 81.73

melebihi target jangka menengah hingga 2024 sebesar 75 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 -2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengelolaan manajemen satker dan persepsi korupsi dan masing-masing Pokja telah melakukan upaya secara optimal untuk melengkapi semua persyaratan kriteria penilaian menuju Satker WBK.

3) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon 1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga. Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2020. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana eselon 1 mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2021 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	59	Kinerja implementasi WBK satker	81.73

Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil rekapitulasi data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Rata-rata Target KKP Se-Indonesia	Target Satker	Rata-rata Capaian KKP Se-Indonesia	Capaian Satker
Kinerja implementasi WBK satker	93,7	75	64,91	81,73

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 6 tercapai melebihi target satker dan rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian indikator kinerja implementasi WBK satker yang tercapai 81.73 atau 109 % dipengaruhi oleh :

- Adanya perubahan target yang semula 70 menjadi 75, sesuai standar minimal Menpan RB.
- Adanya kebijakan baru penilaian WBK seluruh item penilaian minimal 60.

- c) Hasil penilaian kinerja implementasi WBK satker yang di atas 60 hanya pada penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan public, sedangkan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, dan penguatan pengawasan masih di bawah 60.
- d) Komitmen bersama seluruh level organisasi dari pimpinan hingga staf untuk implementasi WBK secara konsisten dan bertanggungjawab.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- a) Belum semua difahami maksud dan item atau unsur penilaian kinerja WBK dan masih memerlukan pendampingan dari Hukormas P2P.
- b) Penilaian WBK dilakukan secara virtual meeting, sehingga adaya keterbatasan dalam penjelasan dokumen yang disampaikan dan hasil penilaian.

Pemecahan Masalah :

- a) Adanya pendampingan dan penguatan kinerja implementasi WBK dari Hukormas P2P.
- b) Adanya waktu yang cukup memadai untuk satker memberikan penjelasan dan menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

AA : Alokasi Anggaran Per Indikator

Ci : % Capaian Indikator

RA: Realisasi Anggaran Per Indkator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$10.74 \% = \frac{((Rp. 100,010,000 \times 1.09) - Rp. 98,272,299)}{Rp. 100,010,000} \times 100\%$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan kinerja implementasi WBK Satker dapat tercapai sebesar 81.73 atau 109% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.98,272,299,- atau 98.26 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 100,010,000,- yang berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10.74 % untuk capaian kinerja sebesar 109 %. Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti koordinasi atau jejaring, konsolidasi, konsultasi, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara *virtual meeting* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

i. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai indikator kinerja implementasi WBK Satker melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Layanan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan umum dan perlengkapan dalam pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif, pengelolaan kantor Berhias, penyusunan rencana umum pengadaan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

2) Layanan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan satker dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui upaya koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, inventarisir pengaduan masyarakat dan pengelolaan UPG, serta penguatan pelaksanaan fungsi PPNS di wilayah kerja.

3) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan organisasi dan reformasi birokrasi Ditjen P2P dalam upaya pembangunan zona integritas menuju Satker WBK, penguatan dan pendampingan *assessment* penilaian Satker WBK/WBMM, yang hingga Tahun 2021 telah dilakukan *pre assessment* oleh Tim Penilai Internal Itjen Kemenkes dan pendampingan oleh Tim Hukormas Ditjen P2P.

4) Layanan Kehumasan dan Protokoler

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan humas dan protokoler melalui kegiatan implementasi keterbukaan informasi public, desiminasi / promosi informasi kegiatan melalui media cetak / bulletin SiGAR, dan implementasi budaya pelayanan prima.

Indikator Keempat :

Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

a. Pengertian

Adalah persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, pertemuan sosialisasi/seminar, *worskhop*, magang dan kegiatan peningkatan SDM lainnya dengan jumlah jam yang diikuti sebanyak 20 JPL selama 1 Tahun.

b. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) Tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

c. Rumus / Cara Perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.

$$\frac{A}{B} \times 100\% = \% C$$

Keterangan :

A = Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan SDM sebanyak 20 JPL

B = Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan SDM sebanyak 20 JPL
yang ditargetkan

% C = Persentase pencapaian mengikuti peningkatan SDM sebanyak 20 JPL

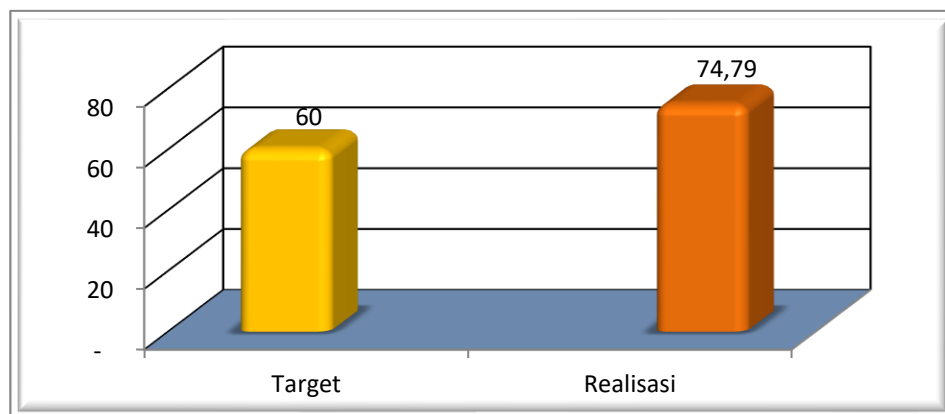
d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL selama Tahun 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{74.79}{60} \times 100\% = 125 \%$$

Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

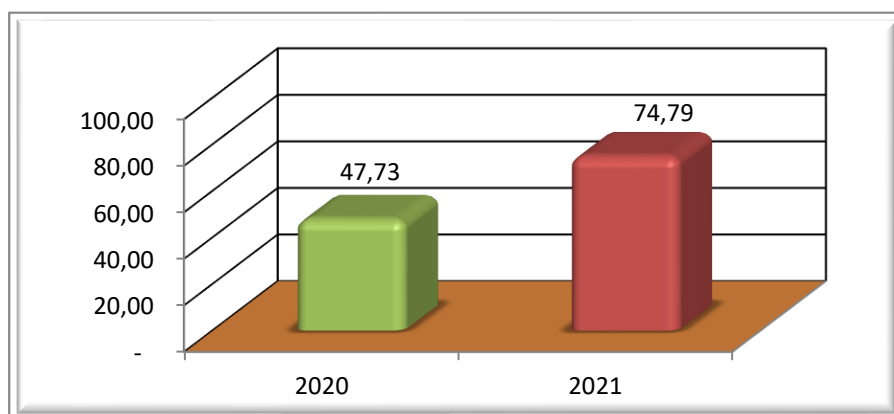


Grafik 21. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Hasil perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja implementasi WBK satker dapat tercapai > 100 % yaitu sebesar 125 %. Hal ini karena telah dilakuka revisi / perubahan target yang semula 80 % menjadi 60 % akibat kondisi pandemic covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas ASN

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2021 merupakan tahap kedua pelaksanaan pada periode Rencana Aksi Kegiatan 2020 s.d 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nomenklatur indikator kinerja kegiatan Tahun 2021 masih sama dengan 2020 atau masih relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

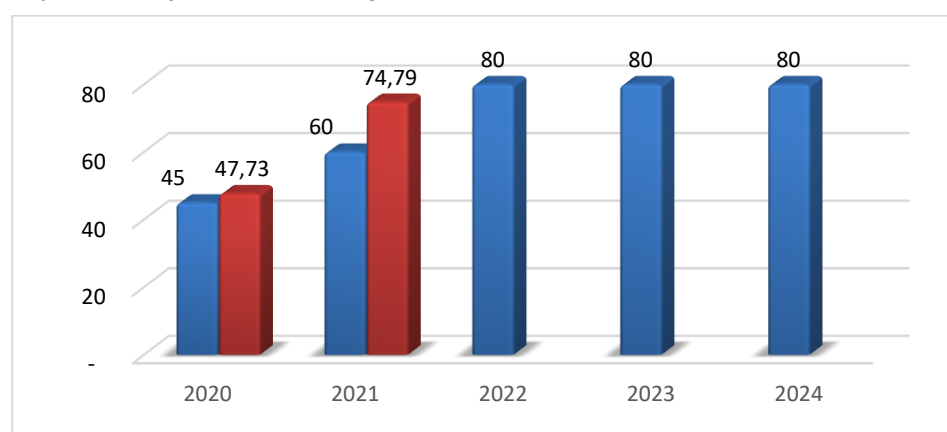


Grafik 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2020 dan 2021

Dari grafik 22, menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja Tahun dibandingkan Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Tahun 2020 telah dilakukan revisi target menjadi 45 % dari sebelumnya 80 % akibat adanya pandemic covid-19 baru dimulai dan mengalami puncak kejadiannya di Indonesia, sehingga penyelenggaraan peningkatan SDM banyak yang dibatalkan. Sedangkan, Tahun 2021 juga dilakukan revisi target menjadi 60 % dari sebelumnya 80 % karena penyelenggaraan peningkatan SDM masih terbatas, meskipun kondisi pandemic covid-19 mulai pulih.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Capaian indikator kinerja kegiatan nilai Indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target RAK 2020-2024 yang merupakan Tahun kedua dari jangka 5 Tahunan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar 74.79 % dengan capaian kinerja 125 % dari target sebesar 60 %.



Grafik 23. Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan Target RAK

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, meskipun masih dibawah target jangka menengah hingga 2024 sebesar 80% yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020 -2024.. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi covid-19 yang mulai pulih, semakin membuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah jam pelajaran yang lebih mudah terpenuhi sebanyak 20 JPL.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon 1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga.

Untuk mengetahui sejauhmana rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tingkat Nasional dengan satuan kerja Tahun 2020. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana eselon 1 mengacu pada renstra kementerian kesehatan yang merupakan indikator kinerja keseluruhan KKP, sedangkan indikator kinerja KKP sesuai teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP. Berikut ini hasil perbandingan capaian kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2021 :

Indikator RAP / Renstra	Target	Indikator RAK	Capaian Indikator
Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	59	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	74.79 %

Namun, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja KKP Se-Indonesia, berdasarkan hasil rekapitulasi data kinerja pada Aplikasi *E-Performance Kemenkes* dapat terlihat perbandingannya sebagai berikut :

Indikator KKP	Rata-rata Target KKP Se-Indonesia	Target Satker	Rata-rata Capaian KKP Se-Indonesia	Capaian Satker
Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	75	60	59,45	74,79

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator 7 tercapai melebihi target satker dan rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Tahun 2021 yang tercapai 125 % dipengaruhi oleh :

- Masa pandemic covid-19 banyaknya penyelenggara pelatihan secara online atau *virtual meeting* yang menerbitkan sertifikat.
- Tersedianya kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang penyelenggaraannya dan pembiayaannya difasilitasi oleh Ditjen P2P.
- Tingginya kesadaran dari para ASN untuk meningkatkan kapasitas diri untuk agar dapat bekerja lebih profesional
- Tuntutan pekerjaan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.

Kendala / Masalah Yang Dihadapi :

- Adanya perbedaan area waktu antara pihak penyelenggara dengan peserta sehingga tidak seluruhnya proses kegiatan pelatihan formal secara online dapat diikuti.
- Adanya gangguan jaringan internet apabila pelatihan dilaksanakan secara online.

- c) Tidak semua ASN melaporkan dan menyerahkan sertifikat hasil peningkatan SDM yang telah diikuti

Pemecahan Masalah :

- a) Pengaturan jadwal yang dapat disesuaikan dengan seluruh peserta pelatihan yang dilaksanakan secara online untuk seluruh area waktu.
- b) Penguatan jaringan internet dan pemberian paket internet selama mengikuti pelatihan.
- c) Menyampaikan informasi kepada semua ASN untuk melaporkan dan menyerahkan sertifikat hasil peningkatan SDM yang telah diikuti.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \times Ci) - RA)}{\sum_{i=1}^n AA} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

AA : Alokasi Anggaran Per Indikator

Ci : % Capaian Indikator

RA : Realisasi Anggaran Per Indikator

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$25.06 \% = \frac{((Rp. 322,220,000 \times 1.09) - Rp. 322,038,664)}{Rp. 322,220,000} \times 100\%$$

Mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Untuk sasaran strategis kegiatan Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dapat tercapai sebesar 74.79 atau 125% dari target yang telah ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.322,038,664,- atau 99.94 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 322,220,000,- yang

berarti terdapat optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 25.06 % untuk capaian kinerja sebesar 125 %.

Selain itu, efisiensi sumber daya lainnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, kegiatan yang bersifat pertemuan tatap muka seperti kegiatan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi dan peningkatan SDM dapat diikuti secara *virtual meeting* melalui aplikasi *zoom* atau aplikasi lainnya berbasis online, dimana kegiatan ini berdampak besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

j. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya koordinasi, sinergi dan komitmen bersama yang dibangun baik antar pengelola program kegiatan dengan lintas program dan lintas sector serta pengelola monitoring dan evaluasi, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan tenaga pelaksana. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai indikator kinerja implementasi WBK Satker Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL melalui kegiatan layanan SDM dan administrasi kepegawaian seperti kegiatan penyusunan analisa kebutuhan dan perencanaan pegawai, layanan mutasi kepegawaian, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator program maupun indikator kinerja kegiatan diperlukan dukungan sumber daya yang memadai yang terdiri atas Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Adapun sumber daya yang dimiliki KKP Kelas II Banjarmasin sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut :

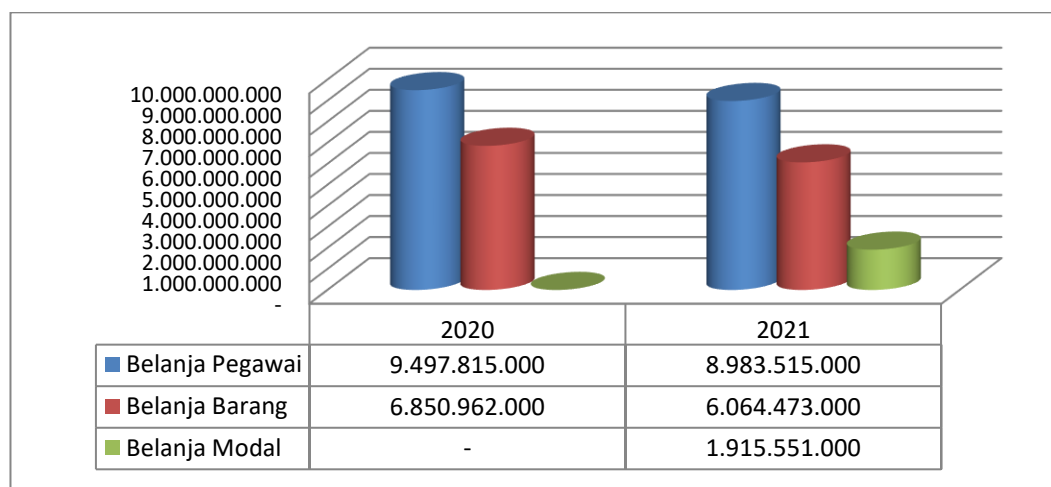
1. Sumber Daya Anggaran

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 memiliki total pagu anggaran awal sebesar Rp. 15,510,075,000,- yang telah ditetapkan pada Tanggal 27 November 2020, dan terdapat revisi penambahan anggaran *Health Security* sebesar Rp. 1,856,000,000,- yang disahkan pada tanggal 08 April 2021 sehingga total pagu menjadi Rp. 17,366,075,000,-. Untuk pemenuhan kebutuhan operasional pengawasan Covid-19 di pintu masuk terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 318.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021, sehingga total pagu menjadi Rp. 17,684,075,000. Terdapat kelebihan alokasi anggaran Belanja Pegawai akibat adanya ASN yang mutasi keluar, pensiun, meninggal dunia dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN), sehingga dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 720,536,000,- sehingga total pagu menjadi Rp. 16,963,539,000,-. Adapun alokasi anggaran berdasarkan sumber pembiayaan yang terdiri dari RM dan PNPB dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7
Perbandingan
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pembiayaan Tahun 2020 s.d 2021

No	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran TA 2020	Alokasi Anggaran TA 2021
1	Rupiah Murni (RM)	12,883,176,000	13,989,676,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3,465,570,000	2,973,863,000
	Jumlah	16,348,746,000	16,963,539,000

Selain itu, alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 24. Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2021

Dari data di atas terdapat penurunan alokasi belanja pegawai dan barang, Tahun 2021 alokasi belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 5.4% dan belanja barang mengalami penurunan sebesar 11.5% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan prioritas penganggaran lebih pada upaya penanganan dan pengendalian pandemic covid-19 dan menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak bersifat *daring* atau *online*. Sedangkan untuk belanja modal Tahun 2021 terdapat alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan perencanaan dan anggaran dalam rangka penguatan *health security* dalam penanganan pandemic covid-19.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan Barang Milik Negara sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Barang Milik Negara yang telah diperoleh dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN yaitu; fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan,

penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu informasi sesuai dengan ketentuan.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2021 ini adalah per tanggal 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan nilai Barang Milik Negara pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61,437,800,392,- yang mencakup seluruh transaksi Barang Milik Negara yang telah diinput dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.

Tabel 8. Laporan Posisi Barang Milik Negara
Neraca Per 31 Desember 2021

Akun Neraca	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	1,303,307,470
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	23,642,680
117199	Persediaan Lainnya	945,000,000
131111	Tanah	41,259,237,000
132111	Peralatan dan Mesin	24,897,589,488
133111	Gedung dan Bangunan	13,816,380,846
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18,974,701,001)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,832,656,091)
162151	Software	141,020,000
166112	Aset Tep yang tidak digunakan dalam oprasi pemerintahan	28,647,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(28,647,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(141,020,000)
	Jumlah	61,437,800,392

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2021, KKP Kelas II Banjarmasin memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun alokasi dan realisasi anggaran program pencegahan dan pengendalian penyakit yang dilaksanakan Tahun 2021 berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

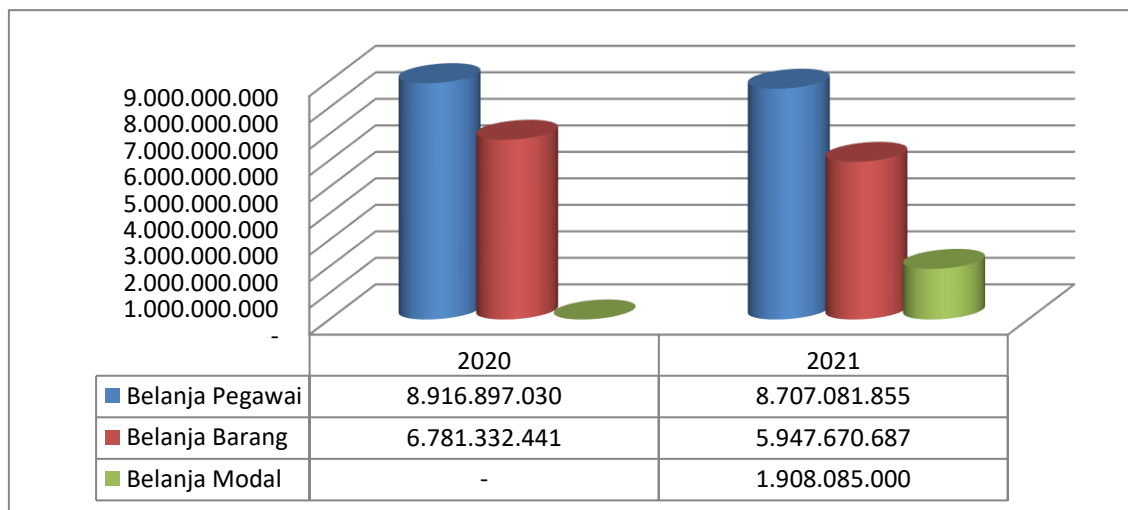
Tabel 9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Belanja Pegawai	8,983,515,000	8,707,081,855	96.92
2	Belanja Barang	6,064,473,000	5,947,670,687	98.07
3	Belanja Modal	1,915,551,000	1,908,085,000	99.61
	Jumlah	16,963,539,000	16,562,837,542	97.64

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5.51% dibandingkan dengan Tahun 2020. Untuk persentase realisasi anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp. 16,562,837,542,- atau 97.64% dari nilai anggaran Rp. 16.963,539.000,-.

Realisasi anggaran per jenis belanja apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2021 terlihat mengalami penurunan realisasi pada belanja pegawai dan belanja barang. Penurunan ini disebabkan karena proporsi kedua belanja ini lebih sedikit dibanding Tahun 2020, adanya pegawai yang pensiun, pindah kerja, meninggal dunia dan CTLN serta pandemi Covid-19 mempengaruhi beberapa pelaksanaan kegiatan pada KKP Kelas II Banjarmasin.

Selain itu, Tahun 2021 terdapat belanja modal untuk pemenuhan sarana prasarana *health security*, peralatan penanganan pandemic covid-19 di pintu masuk, dan perangkat pengolah dan fasilitas perkantoran. Untuk yang lebih jelasnya perbandingan dapat dilihat pada data berikut ini :



Grafik 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 s.d 2021

Selain itu, untuk melihat capaian kinerja dapat dilihat juga berdasarkan realisasi anggaran dan capaian output kegiatan. Untuk perbandingan realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Capaian KRO dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah						
1	4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	873,415,000	857,995,350	98.23	878.500	878.500	100
2	4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,103,136,000	1,056,352,474	95,76	579	579	100

No	Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Klasifikasi Rincian Output		Anggaran			Output		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1,275,100,000	1,274,145,599	99.93	4	4	100
4	4249.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	100,690,000	99,702,100	99.02	10	10	100
Sub Jumlah			3,352,341,000	3,288,195,523	98.09			
B	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen P2P						
1	4815.EAA	Layanan Perkantoran	11,815,675,000	11,506,066,247	97.38	24	24	100
2	4815.EB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	90,240,000	89,166,494	98.81	2	2	100
3	4815.EAC	Layanan Umum	56,260,000	56,029,169	99.59	2	2	100
4	4815.EAD	Layanan Sarana Internal	842,551,000	835,953,000	99.22	67	67	100
5	4815.EAF	Layanan SDM	322,220,000	322,038,664	99.94	72	72	100
6	4815.EAG	Layanan Hukum	10,040,000	8,926,000	88.90	1	1	100
7	4815.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10,190,000	10,084,800	98.68	3	3	100
8	4815.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	23,520,000	23,232,330	98.78	1	1	100
9	4815.EAJ	Layanan Data dan Informasi	120,000,000	120,000,000	100	1	1	100
10	4815.FAI	Pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan	203,340,000	203,309,439	99.98	19	19	100
11	4815.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	117,162,000	116,160,313	99.15	4	4	100
Sub Jumlah			13,611,198,000	13,274,642,019	97.53			
Total			19,963,539,000	16,562,837,542	97.64			

Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran di atas 97% dan realisasi rincian output seluruhnya adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya dilakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi kegiatan untuk mencapai suatu output kegiatan.

Selain itu, realisasi anggaran dapat dilihat dari perbandingan dengan capaian indikator kinerja kegiatan, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639	2,332,058	129	3,005,821,000	2,971,041,949	98.84

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100%	105	245,830,000	217,451,474	88.46
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%	107.87%	120	100,960,000	99,702,100	99.02
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	83	87.86	106	413,580,000	412,475,933	99.73
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	93	98.25	106	12,275,388,000	12,441,855,123	97.39
		6. Kinerja implementasi WBK satker	75	81.73	109	100,010,00	98,272,299	98.26
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	60%	74.79%	125	322,220,000	322,038,664	99.94

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran dari 7 indikator kinerja kegiatan rata-rata > 95 % dengan realisasi anggaran yang tertinggi yaitu pada indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 99.94 % dan capaian kinerja sebesar 125 %. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada indikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 88.46 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 105 %. Apabila dilihat dari capaian kinerja tertinggi yaitu indikator kinerja kegiatan Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 129 % dengan realisasi anggaran sebesar 98.84 % dan terendah pada indikator kinerja kegiatan Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan sebesar 105 % dengan realisasi anggaran sebesar 88.46 %. Hasil pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya pandemic covid-19 yang mengakibatkan peningkatan pengawasan di pintu masuk, sinergitas dari semua pengelola program dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih optimal. Selain itu, menunjukkan bahwa kinerja dapat dilaksanakan dengan baik melebihi dari target yang ditetapkan dan dapat dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk capaian kinerja lebih dari 100 % serta optimalisasi kegiatan melalui realokasi anggaran untuk peningkatan capaian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selama Tahun 2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa walaupun Pandemi Covid-19 masih terjadi selama Tahun 2021, namun capaian kinerja anggaran dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan, sehingga target kinerja kegiatan rata-rata dapat tercapai di atas 100 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97.64 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 16,963,539,000,- yang meningkat sebesar 5,51 % dari Tahun 2020 yang sebesar 96.02 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 16,348,746,000,-. Hal ini disebabkan adanya optimalisasi kegiatan melalui realokasi anggaran kegiatan.

Sedangkan capaian indikator kinerja kegiatan selama Tahun 2021 berdasarkan masing-masing sasaran strategis meliputi :

1. Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan tercapai sebanyak 2,332,058 pemeriksaan atau 129 % dari target yang ditetapkan.
 - b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tercapai sebesar 100 % atau 105 % dari target yang ditetapkan.
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara tercapai sebesar 108% atau 120 % dari target yang ditetapkan.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja anggaran tercapai 87,86 % atau 106 % dari target yang ditetapkan.
 - b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 98.25 atau 106 % dari target yang ditetapkan.
 - c. Kinerja implementasi WBK satker tercapai sebesar 81.73 atau 109 % dari target yang ditetapkan.
 - d. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL tercapai 74.79 % atau 125 % dari target yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja kegiatan antara lain adalah komitmen para pengelola program dalam pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program kegiatan telah dilaksanakan hampir di semua wilayah kerja dan adanya peningkatan serta perluasan target cakupan kegiatan di wilayah kerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan optimal.

Capaian kinerja Tahun 2021 merupakan Tahun kedua pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024, maka untuk meningkatkan capaian program walaupun dengan indikator kinerja yang berbeda sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P 2020 – 2024 melalui upaya-upaya yang meliputi :

1. Penguatan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM terutama baik keahlian sesuai jabatan maupun dalam penguasaan teknologi dan informasi.
3. Peningkatan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan BBTCL PP Banjarbaru dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Penguatan Jejaring Kemitraan dan Koordinasi dengan instansi di wilayah pelabuhan dan bandara untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan kekarantina kesehatan.
5. Peningkatan dan penguatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala secara berjenjang di lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin.
6. Penguatan dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi berbasis online, untuk mempercepat update informasi dan pengelolaan program.

Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dalam mencapai target sasaran kegiatan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, namun terus berusaha meningkatkan kinerja secara internal dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, sedangkan secara eksternal peningkatan menjalin kerjasama lintas program dan sektor terkait.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Basuki Rahmat, S.KM., MM.

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar **Rp.16,963,539,000,-** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 28 Oktober 2021

Pihak Kedua

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS.
NIP. 196405201991031003

Pihak Pertama,

H. Basuki Rahmat, S.KM., MM.
NIP. 197004141991031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2021
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1,808,639
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	60%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp 3,352,341,000,-
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 13,611,198,000,-
Total		Rp. 16,963,539,000,-

Banjarmasin, 28 Oktober 2021

Plt. Direktur Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Banjarmasin,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS.
NIP. 196405201991031003



H. Basuki Rahmat, S.KM., MM.
NIP. 197004141991031003

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA DENGAN RATA-RATA NASIONAL
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SE - INDONESIA
BERDASARKAN REKAPITULASI DATA KINERJA PADA APLIKASI E-PERFORMANCE KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

No	Indikator Program/Kegiatan	Rata-Rata Target KKP Se - Indonesia	Target Kinerja Satker	Rata-Rata Capaian KKP Se - Indonesia	Capaian Kinerja Satker	Keterangan
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan	2.353.406	1.808.639	2.472.280	2.332.058	> Target Satker, < Target Rata2
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95	95	94,92	100	> Target Satker & Target Rata2
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90	90	88,75	107,87	> Target Satker & Target Rata2
4	Nilai Kinerja Anggaran	83	83	65,78	87,86	> Target Satker & Target Rata2
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93	93	78,14	98,25	> Target Satker & Target Rata2
6	Kinerja implementasi WBK satker	93,7	75	64,91	81,73	> Target Satker & Target Rata2
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	75	60	59,45	74,79	> Target Satker & Target Rata2

Catatan :

Dari 7 Indikator Kinerja Kegiatan hanya 1 capaian kinerja yang dibawah rata-rata nasional KKP Se- Indonesia, namun kondisi ini tidak menunjukkan suatu penurunan atau target yang tidak tercapai, karena kegiatan tetapi melebihi target satker, sedangkan 6 indikator lainnya tercapai melebihi target satker pemeriksaan di pintu masuk disesuaikan dengan volume kegiatan pada Satker masing-masing dan rata-rata nasional (data update per 25 Maret 2022)

Mengetahui :
Plt. Kepala KKP Kelas II Banjarmasin,

H. Basuki Rahmat, S.KM., MM.
NIP. 197004141991031003

